

**POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI
KECIL MENENGAH DI KAMPUNG BATIK, KABUPATEN
TUBAN:
Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

ALDA EMIRA

NIM: I01219006

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alda Emira
NIM : 101219006
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Politik Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Maret 2023

Penulis



Alda Emira

NIM. 101219006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alda Emira

NIM : I01219006

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : **Politik Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers**

Surabaya, 08 Mei 2023

Pembimbing



Holilah, S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Alda Emira dengan judul: “Politik Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 April 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Holilah. S.Ag. M.Si
NIP. 197610182008012008

Penguji II



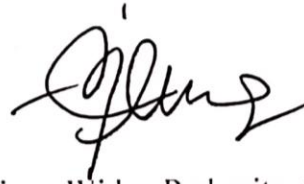
Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji III



Noor Rohman, M.A.
NIP. 198510192015031001

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 04 Mei 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alda Emira
NIM : 101219006
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : aldaemira28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KAMPUNG BATIK, KABUPATEN TUBAN (Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2023

Penulis

(Alda Emira)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Alda Emira, 2023, *The Politics of Community Empowerment for Small and Medium Industries in Batik Village, Tuban Regency: Community Empowerment Perspectives Robert Chambers*, Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Politics, Community Empowerment and Small and Medium Industries

This research is motivated by the increase in poverty that has occurred in Tuban Regency during the current post-covid-19 economic recovery period. As for one of the efforts to reduce poverty, namely through the Small and Medium Industries (IKM), the industry has the opportunity to restore the state and regional economies. The SME sector has a large capacity to absorb labor and distribute social welfare, so that SMIs are important and a reliable source of economic activity. There are many IKM in Tuban Regency that have the potential to absorb labor, one of which is IKM in Kampung Batik.

This study aims to describe and describe the strategies for empowering the IKM community in Batik Village by the Regional Government, the supporting and inhibiting factors for empowering the SME community empowerment in Batik Village by the Regional Government. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study used the Miles and Huberman model which consisted of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used is Community Empowerment Theory.

The results of the study show that the empowerment strategy carried out by the Regional Government for SMI actors is quite good, but not long-term. The strategy through related agencies, namely the Office of Manpower and Industry of Tuban Regency is supported by efforts in the form of batik mark programs, certification of craftsmen, certification of brands or motifs and infrastructure assistance programs in the form of materials or tools. The Office of Cooperatives, Micro and Medium Enterprises and Trade is supported by efforts in the form of training programs, partnerships and infrastructure assistance. Factors supporting IKM empowerment are the availability of qualified materials and human resources, while the inhibiting factors are the passive response of IKM actors, lack of understanding of the programs provided by the agency, no regeneration of batik business successors. Solutions for dealing with obstacles through IKM data updates, IKM batik festivals and batik creation contests.

ABSTRAK

Alda Emira, 2023, *Politik Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah Di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Politik, Pemberdayaan Masyarakat, Industri Kecil dan Menengah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tuban di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 sekarang ini. Adapun salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yakni melalui Industri Kecil Menengah (IKM), industri memiliki peluang untuk memulihkan ekonomi negara maupun daerah. Daya serap tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sangat banyak di sektor IKM, sehingga IKM menjadi penting dan merupakan sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. IKM di Kabupaten Tuban yang memiliki potensi daya serap tenaga kerja banyak salah satunya IKM di Kampung Batik. Studi ini menganalisis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik dan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Pendamping, Kepala Desa, Ketua BUMDes dan pelaku IKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM sudah cukup baik akan tetapi tidak bersifat jangka panjang. Adapun strategi melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban didukung dengan upaya berupa program batik mark, sertifikasi pengrajin, sertifikasi merek atau motif atau motif dan program bantuan sarpras berupa bahan atau alat. Untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan didukung dengan upaya berupa program pelatihan, kemitraan dan bantuan sarpras. Faktor pendukung pemberdayaan IKM yakni ketersediaan bahan dan SDM yang mumpuni, sedangkan faktor penghambat pemberdayaan IKM yakni respon pelaku IKM yang pasif, kurang pemahaman mengenai program yang diberikan dinas, tidak ada regenerasi penerus usaha batik. Solusi dalam menangani hambatan melalui update data IKM, festival IKM batik dan lomba cipta karya batik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	10
1. Politik.....	10
2. Pemberdayaan masyarakat	11
3. Industri Kecil Menengah (IKM).....	11
BAB II KAJIAN TEORITIK	13
A.Penelitian Terdahulu	13
B.Kajian Teori	23
1. Teori Pemberdayaan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A.Pendekatan Penelitian	29
B.Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C.Pemilihan Subyek Penelitian	31
D.Tahap-Tahap Penelitian	32

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan	37
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kampung Batik Kabupaten Tuban	41
2. Deskripsi Industri Kecil dan Menengah Kampung Batik	44
3. Deskripsi Pengrajin Batik Gedhog Kampung Batik Tuban	46
4. Deskripsi Batik Gedhog Tuban	50
B. Analisis dan Pembahasan.....	57
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik	57
2. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik	96
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sentra Batik di Kabupaten Tuban.....	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Owner Aktif	47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Gapura Masuk Kampung Batik.....	43
Gambar 4. 2 Menghani.....	53
Gambar 4. 3 Pencucukan Pada Sisir	55
Gambar 4. 4 Jumlah Batik Bersertifikat.....	79
Gambar 4. 5 Motif-Motif Batik Bersertifikat.....	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tuban menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan kemiskinan di tahun 2021, adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 371.465 per kapita¹, maka garis kemiskinan Kabupaten Tuban pada Maret 2021 adalah Rp 388.176 per kapita per bulan, meningkat Rp16.711,00 per kapita per bulan atau naik 4,50 persen. Di Kabupaten Tuban, rata-rata penduduk miskin yang tinggal di rumah tangga miskin per Maret 2021 mencapai 4,07 jiwa. Dengan demikian, rata-rata jumlah rumah tangga miskin di bawah garis kemiskinan adalah Rp. 1.579.876.32.²

Berdasarkan persentase kenaikan yang terjadi maka diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah yakni melalui industri kecil menengah (IKM), industri memiliki peluang untuk membantu memulihkan perekonomian yang terjadi baik perekonomian pusat maupun daerah. IKM memiliki daya serap tenaga kerja sangat banyak, selain itu IKM juga dapat membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menyatakan bahwa IKM menjadi penting serta merupakan sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. Salah satu IKM yang berpotensi untuk membantu memulihkan perekonomian yakni Kampung Batik. Kemiskinan

¹ BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka (Tuban Regency in Figures) 2022*, BPS Kabupaten Tuban, 2021.

² Ibid.

yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya di Kampung Batik dapat teratasi dengan pemberdayaan terhadap IKM di Kampung Batik.

Kemiskinan terjadi ketika sejumlah orang atau sekelompok orang tidak dapat mempertahankan tingkat kehidupan tertentu. Ketika seseorang atau sekelompok orang dianggap miskin, itu berarti mereka kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, seperti uang dan produk. Kurangnya pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu penyebab kemiskinan.³

Pemerintah telah lama melakukan upaya untuk memerangi kemiskinan. Namun, krisis pandemi Covid-19 baru terlihat oleh pemerintah setelah berdampak pada perekonomian rakyat yang mana hal tersebut membuat ekonomi rentan dan memerlukan penanganan yang lebih keras ke depan karena tantangan yang semakin berat.⁴ Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) nasional agar lebih produktif dan berdaya saing di tingkat dunia. Hal ini mengingat sektor IKM secara historis telah menjadi tumpuan perekonomian negara. Karena dampak pandemi Covid-19, IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu pemulihan ekonomi negara.⁵

³ Agus Hari Pradita and Wahyu Hidayat Riyanto, "Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 5, no. 1 (2021): 42–50.

⁴ Hazarul Aswadi, "Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pelatihan IKM Berbasis Kerajinan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

⁵ <https://kemenperin.go.id/artikel/22765/Berperan-Pulihkan-Ekonomi-Nasional.-IKM-Dipacu-Masuk-Rantai-Pasok-Global> (diakses pada 14 Februari 2022)

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Industri Kecil Menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian 64/M-IND/PER/7/2016 IKM adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh berbagai jenis makhluk hidup, antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. IKM berperan penting dalam mendongkrak potensi ekonomi desa karena juga merupakan soko guru perekonomian nasional.⁶

Di Kabupaten Tuban, IKM mempunyai peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan industri, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat, dan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembangunan juga akan menghasilkan perubahan yang lebih bersifat nonpertanian, serta fungsi sektor ekonomi nasional yang erat dan saling membantu antar sektor, yang akan memperkuat ketahanan ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, diantisipasi bahwa pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan operasi promosi pembangunan di daerah lain. Dengan mempererat hubungan antara industri dengan sektor industri lainnya, terutama yang mengandung bahan baku industri, membina lingkungan yang menguntungkan bagi investor, dan mendorong pembangunan industri, maka pembangunan sektor industri akan

⁶ Eka Pratiwi Septania Parapat and Ricat Berlien, "Analisis Peningkatan Potensi Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis Teknologi Pada Masyarakat Nelayan Desa Sirukkungan Kabupaten Toba Sumatera Utara," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 3389–3397.

dikembangkan secara bertahap dan menyeluruh. Perkembangan industri nasional sangat tergantung pada kemampuan masing-masing lokasi dan iklim usaha.⁷

Industri kerajinan kecil dan menengah tumbuh sebagai hasil dari perluasan sektor industri Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tuban. Industri kecil menengah yang secara khusus dibahas dalam penelitian ini adalah industri batik. Batik merupakan industri budaya tradisional yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi kreatif Indonesia dan juga memberikan dampak tidak langsung pada sektor perdagangan dan pariwisata.⁸

Dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan, sektor IKM menjadi sangat penting. IKM merupakan sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan.⁹ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha atau sebagai mayoritas (99,7%) dari total unit usaha industri di Indonesia yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%, dengan sektor yang paling dominan adalah makanan dan minuman, fashion dan kerajinan.¹⁰ Berdasarkan pernyataan Dirjen IKMA bahwa sektor IKM telah menyerap tenaga

⁷ Rendi Anggara Putra, "Analisi Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Pengusaha Batik Tulis Klasik Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban," *Repository Untag SBY* (2022): 1–10.

⁸ Amelia Kurniawati, "Knowledge Management in Small and Medium Industry: A Cluster Analysis in Kampoeng Batik Laweyan," *International Journal of Knowledge Engineering* 5, no. 1 (2019): 35–39.

⁹ Sri Kasnelly and H Ahmad Luthfi, "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional," *Sembadha* 02 (2021): 351–355.

¹⁰ <https://kemenperin.go.id/artikel/22765/Berperan-Pulihkan-Ekonomi-Nasional,-IKM-Dipacu-Masuk-Rantai-Pasok-Global> (diakses pada 14 Februari 2022)

kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25% dari total tenaga kerja di sektor industri.¹¹

Akibat dampak pandemi Covid-19, industri memiliki peluang yang sangat besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara. Ketahanan sektor manufaktur dalam negeri sangat terbantu dengan pemberdayaan dan perluasan keterlibatan sektor IKM. Pertumbuhan IKM diberikan fokus khusus di Kabupaten Tuban, dan pendampingan diberikan dalam bentuk pemberdayaan.¹²

Dalam upaya pemberdayaan diperlukan komunikasi dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan pemerintah. Penciptaan kebijakan pemberdayaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, masyarakat memiliki suara dalam bagaimana kebijakan diimplementasikan atau dibuat, misalnya dengan menawarkan saran kepada pemerintah. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan mengidentifikasi isu-isu di daerah, berkontribusi pada pengembangan rencana dari perspektif masyarakat, melaksanakan kebijakan pemerintah, mengambil bagian dalam pengawasan mereka, dapat mengukur seberapa baik mereka bekerja, dan merasakan efek positifnya.¹³

¹¹ <https://kemenperin.go.id/artikel/23817/Sederet-Jurus-Kemenperin-Dongkrak-Daya-Saing-IKM#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%2C%20jumlah%20IKM,unit%20usaha%20industri%20di%20Indonesia> (diakses pada 14 Februari 2022)

¹² Anisa Nuur Fadhillah, Tri Yulianti, and Adi Soesiantoro, "Tranformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi," *Seminar Nasional 2022* 1, no. 01 (2022).

¹³ Hawa La'ala Nabilla Fada, "Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Girilayu," *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 7, no. 1 (2022): 1–19.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat disebabkan oleh faktor internal (pandangan mereka sendiri) atau dari faktor eksternal (tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Setelah diberdayakan, diharapkan masyarakat semakin sejahtera, semakin kuat, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan akhirnya menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dibicarakan di sini tidak hanya mencakup komponen ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya, dan politik, bahkan kemandirian masyarakat dalam menegakkan hak-hak politiknya.¹⁴

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi peneliti mengambil pemberdayaan terhadap pelaku IKM, dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini Pemerintah daerah dapat membantu pelaku IKM selama tahap pemulihan ekonomi dengan menawarkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku IKM. Dengan masuknya industri kecil baru seperti sektor batik, industri kecil Tuban terus berkembang. Desa Margorejo, Kecamatan Kerek merupakan tempat Sentra Industri Batik yang terkenal di Kabupaten Tuban. Karena adanya dorongan untuk melestarikannya, maka industri batik di Desa Margorejo pada mulanya mencakup berbagai komponen sosial dan budaya. Batik mungkin telah menggantikan pertanian sebagai sumber utama kehidupan sehari-hari di Desa Margorejo akibat bangkitnya peradaban manusia dan rumitnya kebutuhan manusia.¹⁵

¹⁴ M.Si Ir. Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca*, vol. 1, 2018.

¹⁵ Putra, "Analisi Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Pengusaha Batik Tulis Klasik Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban."

Warga Kota Tuban sangat mengenal produk batik yang dihasilkan oleh industri kreatif Desa Margorejo yang biasa dikenal dengan “Batik Gedhog”. Dari segi tata cara dan alat yang digunakan, usaha kreatif batik di Desa Margorejo, Kerek, Tuban masih mengolah kain secara sederhana. Kota tetangga terdekat Bojonegoro juga memiliki produk unggulan hasil kerajinan rumahan berupa batik gedhog khas Margorejo.¹⁶

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa kerajinan batik gedhog Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban memiliki berbagai macam komoditi diantaranya batik, tenun gedhog, pemintal benang dan tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa kerajinan batik gedhog Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban memiliki jenis bahan baku paling banyak, unit terbanyak, dan tenaga kerja paling banyak yaitu 104 unit dan 109 pekerja. Jenis bahan bakunya adalah tenun gedhog.

Tabel 1. 1
Data Sentra Industri Batik di Kabupaten Tuban

No	Komoditi	Wilayah		Jenis Bahan Baku	Jumlah	Tenaga Kerja		
		Desa	Kec			W	P	Jumlah
1	Batik tenun	Gaji	Kerek	Tenun gedhog	54	54	-	54
2	Batik tenun	Jarorejo	Kerek	Tenun gedhog	25	34	2	36
3	Batik tenun	Margorejo	Kerek	Tenun gedhog	104	109	-	109

¹⁶ Ema Nurdiantika and Bambang Sigit Widodo, “Karakteristik Kehidupan Pengrajin Batik (Studi Kasus Di Wilayah Kerajinan Batik Gedog Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban),” *Swara Bhumi* 2, no. 2 (2015): 302–309.

4	Batik tenun	Karanglo	Kerek	Tenun gedhog	20	30	-	30
5	Batik tulis	Prunggan Kulon	Semanding	Mori	23	85	-	85
6	Batik tulis	Karang	Semanding	Mori	57	60	-	60
7	Batik tulis	Semanding	Semanding	Mori	40	28	-	28
8	Batik tulis	Gesikharjo	Palang	Mori	8	40	-	40
9	Batik tulis	Kedungrajo	Kerek	Mori	20	18	-	18
10	Batik tulis	Sugiharjo	Tuban	Mori	15	14	1	15
11	Batik tulis	Sumuragung	Tuban	Kaos	59	82	-	82
12	Batik tulis	Jarorejo	Kerek	Kaos	1	-	1	11
13	Batik tulis	Mandirejo	Merakurak	Kaos	1	10	3	32
	Jumlah	9	5		432	559	4	595

Sumber: hasil wawancara yang diolah, 2023

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Batik Desa Margorejo dimana pelaku IKM diharapkan lebih tanggap dan cepat berinovasi. Pemberdayaan pelaku IKM ini perlu dilakukan, karena dua alasan berikut. *Pertama*, agar pelaku IKM dapat menciptakan produk yang benar-benar memenuhi tuntutan dan preferensi pasar, mereka harus memahami evolusi perubahan perilaku konsumen. *Kedua*, agar pelaku IKM dapat memanfaatkan teknologi, mereka harus mengambil tindakan inovatif karena lingkungan persaingan untuk barang-barang yang diciptakan oleh pelaku IKM seringkali lebih menuntut.

Industri kecil menengah daerah memerlukan strategi bertahan untuk menjaga semuanya tetap stabil, mulai dari produksi hingga pemasaran.¹⁷

Dari uraian permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah Di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan konteks masalah yang diangkat di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa strategi pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik.

¹⁷ Anggraeny Puspaningtyas and Ahmad Adhi Suprayitno, “Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban,” *Reformasi* 11, no. 2 (2021): 217–225.

2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa Ilmu Politik dalam mengembangkan penelitian khususnya di bidang-bidang seperti studi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai sumber penelitian selanjutnya dan memberikan informasi baru baik bagi peneliti maupun mahasiswa jurusan ilmu politik secara lebih umum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan saran kepada pihak yang terkait pemerintah daerah mengenai strategi pemberdayaan masyarakat ditingkat lokal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam membuat kebijakan lainnya dimasa yang akan datang.

E. Definisi Konseptual

1. Politik

Menurut KBBI arti kata politik ialah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintah dan dasar pemerintah. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics*

sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*politics*) yang terbaik. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah upaya untuk menetapkan hukum yang akan diterima oleh mayoritas warga negara, untuk menggerakkan masyarakat menuju hidup bersama yang damai.

2. Pemberdayaan masyarakat

Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan cepat, Swasono berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan memerlukan pembangunan ekonomi bagi sebagian besar rakyat Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Goulet, kehidupan yang lebih baik pada dasarnya memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang serta kebebasan mereka akan kemandirian dan harga diri. Akibatnya, para ekonom berpendapat bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat harus sederhana dan harus menempatkan prioritas pada apa yang disebut kebutuhan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.¹⁸

3. Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri yang memiliki skala industri kecil menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No 6 Tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan

¹⁸ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, and Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 12 (2015): 7–11.

tempat usaha.¹⁹ Sedangkan, yang dimaksud industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.²⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Peraturan Menteri Perindustrian, No.6/M-IND/PER/7/2016 Pasal 3 Ayat 1.

²⁰ Peraturan Menteri Perindustrian, No.6/M-IND/PER/7/2016 Pasal 4.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan judul penelitian yang mengkaji mengenai pemberdayaan partisipatif, maka topik penelitian terdahulu yang penulis gunakan tidak jauh berbeda dengan judul, yaitu mengenai politik dan pemberdayaan. Penelitian terdahulu berguna untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan bahan analisis dan mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan. Berikut hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrohatin dengan judul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tulis Di Desa Tampo Kecamatan Cluring”. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan kontribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah batik, serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan dan strategi dinas untuk mengatasi tantangan tersebut.²¹ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasanya peran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi pembinaan IKM baru, pengembangan dan pengawasan IKM, fasilitasi IKM, mewujudkan pengembangan IKM ke arah yang lebih baik dan berhasil, mewujudkan persaingan yang baik dan sehat,

²¹ Siti Masrohatin, “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tulis Di Desa Tampo Kecamatan Cluring” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok berupa monopoli yang merugikan masyarakat.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrohatin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada peran dan hambatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian saja. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian sebelumnya teori sebagai perspektif, bukan untuk diuji. Sementara dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Silviana dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Produksi Batik Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi batik di Desa Batik Pesindon berlangsung, pengaruh pemberdayaan usaha industri batik Pekalongan terhadap kesejahteraan warga di Desa Batik Pesindon, serta faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan

masyarakat tersebut.²² Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya model pemberdayaan dikembangkan berbasis potensi lokal melalui tahapan persiapan atau tahap *look and think*, tahap *act, monitoring* dan evaluasi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ika Silviana dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rischi Agustina dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Dan Menengah (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui kondisi dalam peningkatan perekonomian lokal kota Kediri melalui pemberdayaan IKM melalui peran *stakeholder*.²³ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya keterlibatan *stakeholder* memberikan dampak positif untuk keberlangsungan pemberdayaan IKM dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri.

²² Ika Silviana, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Produksi Batik Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan” (Universitas Negeri Semarang, 2019).

²³ Rischi Agustina, “Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Dan Menengah (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Kediri)” (Universitas Brawijaya, 2019).

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Risch Agustina dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian sebelumnya teori sebagai perspektif, bukan untuk diuji. Sementara dalam penelitian saat ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati dalam judul “Peran Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Surakarta”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Surakarta serta tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.²⁴ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan industri kecil menengah yakni potensi alamiahnya yang besar dalam berperan menyelesaikan masalah kesempatan kerja.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada

²⁴ Siti Nurhayati, “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta” (Universitas Sebelas Maret, 2019).

penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya fokus mengembangkan industri kecil menengah yakni potensi alamiahnya yang besar dalam berperan menyelesaikan masalah kesempatan kerja. Pisau analisis dalam penelitian sebelumnya berdasarkan kebijakan. Sementara dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Adhe Filima Fadrianto dalam judul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”. Penelitian ini terfokus untuk memahami peran Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Malang dalam mempromosikan dan memperluas IKM.²⁵ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang, khususnya melalui pelatihan, promosi, dan operasi pemantauan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adhe Filima Fadrianto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang

²⁵ Adhe Filima Fadrianto, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah” (Universitas Brawijaya, 2019).

digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya fokus peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang sesuai RENJA. Penelitian sebelumnya dalam menganalisis menggunakan patokan indikator Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018. Sementara dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti dan Budi Puspo Priyadi dalam judul “Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”. Fokus penelitian pada penelitian ini yakni untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kelurahan Tlogosari Kulo Kecamatan Peduruban Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pengaturan dan pembinaan.²⁶ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya *stakeholders* terkait dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

²⁶ David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti, and Budi Puspo Priyadi, “Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” *Jurnal Natapraja* 7, no. 2 (2019): 245–258.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti, and Budi Puspo Priyadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanati, Aktivani Inas Almira, Riyaya Hajja Nugrohowati dalam judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban”. Fokus penelitian pada penelitian ini yakni untuk memahami bagaimana pemerintah daerah di Kabupaten Tuban mendukung UMKM.²⁷ Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, Pemerintah Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagai fasilitator, pengawas, dan katalisator dalam proses pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, namun pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanati, Aktivani Inas Almira, Riyaya Hajja

²⁷ Ertien Rining Nawangsari et al., “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tuban,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 5, no. 2 (2021): 345.

Nugrohowati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya fokus kepada peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tuban. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian sebelumnya Teori dari Gede Diva mengenai tiga indikator peran pemerintah. Sementara dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro dan Muhammad Agus Junaidi dalam judul “Pemberdayaan UMKM Batik Tulis di Kampong Batik Jetis oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo”. Adapun fokus penelitian dalam penelitian yakni bagaimana Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Sidoarjo telah membantu UKM Batik Tulis di Kampong Batik Jetis menjadi lebih berdaya.²⁸ Temuan penelitian ini meliputi kegiatan pemberdayaan di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan peningkatan kelembagaan sosial.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro dan Muhammad Agus Junaidi dengan penelitian yang dilakukan

²⁸ Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro, and Mohammad Agus Junaidi, “Pemberdayaan UMKM Batik Tulis Di Kampong Batik Jetis Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo,” *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2021): 1–10.

oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Ginagar Alamsyah dalam judul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis”. Adapun fokus penelitian ini terletak pada peran Pemerintah Kelurahan dalam mengelola UMKM batik.²⁹ Temuan penelitian ini pengelolaan UMKM batik oleh pemerintahan melalui upaya pemasaran, dalam hal pemasaran pemerintah kelurahan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam pameran.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Ginagar Alamsyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah di

²⁹ Bachtiar Ginagar Alamsyah, “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Agustini Tanjung, Nur' Aeni, Sinta S. Heriyanti dalam judul “Peningkatan Tata Kelola Desa Dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur”. Adapun fokus penelitian ini yaitu bentuk peningkatan yang dilakukan melalui tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis digital.³⁰ Temuan dalam penelitian ini beberapa kegiatan pada program pengabdian masyarakat mencakup antara lain, pengembangan UMKM, Seminar dan pelatihan daya saing UMKM dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi produk, pengembangan varian rasa produk, design packing yang lebih menarik pada UMKM. Melalui berbagai inisiatif sosialisasi dan pelatihan termasuk komunitas virtual yang dirancang dengan tujuan memprioritaskan peningkatan pendapatan keluarga dan mengintegrasikan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agustini Tanjung, Nur' Aeni, Sinta S. Heriyanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di kampung batik oleh pemerintah kabupaten, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil

³⁰ Agustini Tanjung, Nur' Aeni, and Shinta S. Heriyanti, “Peningkatan Tata Kelola Desa Dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur,” *Jurnal Abdimas Pelita* ... 2, no. 01 (2021): 7–13.

menengah di Kampung Batik serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan, dalam penelitian saat ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers.

B. Kajian Teori

1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses menciptakan berdaya pihak yang tidak/kurang berdaya (*the powerless*) dan sebaliknya meminimalisir orang/pihak yang terlalu dominan atau berkuasa (*the powerful*) untuk menciptakan pola hubungan kekuasaan yang seimbang dan harmonis dalam sebuah tatanan masyarakat.³¹

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim, pemberdayaan adalah proses sadar masyarakat yang transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan memperbaiki kondisi kehidupan yang diinginkan dan meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai persoalan mendasar untuk berproses.³² *Kedua*, Toto Wardikanto mendefinisikan pemberdayaan sebagai serangkaian prakarsa yang ditujukan untuk meningkatkan atau memaksimalkan kemampuan dan/atau keunggulan kompetitif kelompok lemah dalam masyarakat, seperti mereka yang tidak mampu.³³

³¹ Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang/Robert Chambers* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1997).

³² Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

³³ Toto Wardikanto, *Poerwono Soeboto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Kemudian menurut Mardikanto dan Soebianto, kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada metodologi kerja tertentu. Konsep strategi sering disalahartikan dengan metode, teknik, atau taktik karena, dalam pengertian umum, sering dicirikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan. Baik proses maupun tujuan dapat digambarkan sebagai pemberdayaan. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang telah dibahas sebelumnya.³⁴ Berbagai inisiatif digunakan untuk memperkuat dan/atau memaksimalkan pemberdayaan kelompok sosial yang rentan, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat adalah cara atau upaya yang digunakan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, inisiatif pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) juga merupakan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan

³⁴Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang," *Ijd-Demos* 1, no. 2 (2020): 262–289.

masyarakat mengacu pada daya atau kekuatan, oleh karena itu merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya melalui inspirasi, motivasi, dan kebangkitan potensi.³⁵

Dalam tulisan Robert Chambers, ‘orang luar’ untuk membantu mengatasi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat sendiri, terletak pada ‘orang luar’ yang memiliki kekuatan, serta sumber-sumber lebih besar dan kebanyakan bukan penduduk desa atau penduduk miskin. Oleh karena itu, komponen kunci dari teori Chambers tentang pemberdayaan masyarakat adalah pengambil alihan penguasaan atas pengetahuan dan informasi, yang merupakan sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan agen pembangunan) oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, dengan menggali dan menghargai pengetahuan dan teknologi lokal, serta menjadikan proses pembelajaran sebagai milik masyarakat, bukan milik orang luar. Selain itu, Chambers memandang persoalan kekuasaan dalam konteks hubungan antara kelompok dominan/elite masyarakat dengan kelompok masyarakat paling miskin (marjinal), antara kelompok ‘atas’ dengan kelompok ‘bawah’, antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin (dalam skala komunitas, nasional maupun global).³⁶

Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol kehidupan warga negara (rakyat) adalah kekuasaan dalam pengertian politik. Sistem

³⁵ Firdaus Robi, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Partai Politik: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

³⁶ Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang/Robert Chambers*.

demokrasi harus dibangun untuk membatasi kekuasaan politik. Oleh karena itu, salah satu prinsip dasar demokrasi adalah tersedianya wadah partisipasi warga negara yang dapat menahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terpilih. Jadi, meski kemudian elit politik memegang kendali, rakyatlah yang sebenarnya memegang kekuasaan. Hal ini karena tidak ada sistem pemerintahan yang berfungsi yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat, yang mana diakibatkan dari rakyat belum mampu melindungi kekuasaannya. Di sisi lain para pemimpin politik seringkali tidak bersedia membatasi otoritas mereka dan bahkan berusaha untuk meningkatkan kekuasaan yang dimiliki.

Chambers mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu strategi. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep tersebut mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Dengan demikian, dinas sudah seharusnya memiliki andil dalam melakukan pemberdayaan karena dinas memiliki kuasa yang mampu memusatkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan dengan model pemberdayaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada alternatif pertumbuhan ekonomi dengan

memberikan fasilitas untuk masyarakat desa itu sendiri. Fasilitator pemberdayaan harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang artinya fasilitator secara terus-menerus menguji tingkah laku masyarakat dalam proses pembelajaran, dan saling berbagi informasi dan gagasan antar masyarakat desa, masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator.³⁷

Pemikiran Robert Chambers selaku promotor dan pengembang metodologi PRA, tentu perlu dipahami. Robert Chambers, terutama dalam dua buku utama yang ditulisnya, mengkritik “orang luar” yang bekerja di masyarakat, tetapi berperilaku tidak “sensitif” terhadap keadaan dan persoalan masyarakat (terutama yang paling miskin). Orang luar yang dimaksudkan oleh Chambers antara lain adalah peneliti, staf pemerintah, staf LSM, staf lembaga pelatihan, dsb yang bekerja dengan masyarakat. Mengapa kritik Chambers ditujukan kepada mereka? Menurut Chambers, orang paling miskin dan marjinal adalah kelompok masyarakat yang paling “tidak kelihatan” (*unseen*) oleh orang luar yang bekerja di masyarakat. Hal ini terjadi karena orang luar adalah orang-orang yang memiliki banyak “bias” dalam memahami masyarakat, akibat latarbelakang budayanya sendiri. Orang luar mempunyai persepsi dan cara pandang tertentu terhadap masyarakat, serta mempunyai kepentingan dan hanya mau memberikan sedikit waktu untuk berada di tengah masyarakat. Karena membatasi diri dengan cara pandangnya sendiri, orang luar seringkali gagal mengetahui tentang masyarakat yang

³⁷ Ibid.

paling marjinal. Celaknya, orang luar tidak tahu apa yang tidak diketahuinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Melihat dari topik penelitian ini, maka metode yang dipilih peneliti dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah. Karena data yang dihasilkan bersifat kualitatif, maka pendekatan ini disebut kualitatif. Dalam penelitian ini, data disajikan sebagai temuan wawancara dan beberapa bahan pendukung. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam.³⁸ Penggunaan penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mengungkap fenomena sosial dengan fakta-fakta yang ada, dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti berupa politik tata kelola kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban. Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.³⁹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang dimana dalam mengkaji sebuah kejadian atau aktivitas dilakukan dengan lebih mendalam,⁴⁰ studi kasus dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan Industri Kecil Menengah oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

³⁸Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2013).

³⁹Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, 2015.

⁴⁰Miftah Faridl Widhagdha and Suryo Ediyono, "Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia," *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)* 1, no. 1 (2022): 71–76.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi yang sesuai dengan judul yaitu Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah Di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers maka penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, rumah kepala desa, rumah, tim pendamping, rumah ketua BUMDes Margo Makmur dan rumah pelaku IKM, serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Alasan penulis memilih objek penelitian karena lokasi tersebut berkenaan langsung dengan ikon Kabupaten Tuban yakni batik, wisata kampung batik Desa Margorejo ini memiliki kekayaan lokal berupa Batik dan Tenun Gedhog serta tempat pelaksanaan program pemberdayaan IKM Kabupaten Tuban.

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 2 Desember 2022 – 13 Maret 2023. Hal ini memakan waktu cukup lama karena terdapat beberapa kendala yaitu: tempat penelitian yang beragam, pengurusan administrasi penelitian yang memakan waktu yang lama, administrasi penelitian ke Kantor Dinas yang tidak cekatan sehingga peneliti harus mengurus ulang di hari H wawancara dan untuk melakukan wawancara harus menyesuaikan waktu dengan informan.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Penentuan dalam pemilihan subyek peneliti yang menggunakan Teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan secara cermat, sehingga dapat memberikan data yang masif atau kuat dan komprehensif teliti terhadap fenomena yang ada dan dibutuhkan pada penelitian ini.⁴¹ Dalam *purposive sampling* informan dipilih berdasarkan kriteria yang dipilih sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian.

Adapun secara garis besar informan dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, pemerintah yang dimana dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban, tim pendamping dan masyarakat/pelaku IKM yang ikut dalam program pemberdayaan IKM, tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan IKM. Berikut penjelasannya:

Tabel 3. 1

Nama Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Motif
Handi Ari Setyawan, S.H	Kepala Bidang Perindustrian	Menginginkan pengembangan pemberdayaan IKM batik
Martha Nuringati Agustya, S.E.	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Staf Bidang UMKM	Menginginkan pengembangan pemberdayaan IKM batik
Hendra Wahyudi	Pendamping	Memiliki kesadaran terkait keberlanjutan kontribusi pemberdayaan IKM batik

⁴¹H Afifuddin and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Junaedi	Kepala Desa	Menginginkan sejarah dan perkembangan IKM batik
Sonif Efendi	Ketua BUMDes Margo Makmur	Menginginkan sejarah dan perkembangan pemberdayaan IKM batik
Nanik Hariningsih, S.Pd	Pelaku IKM	Penerima pemberdayaan IKM
Srinah	Pelaku IKM	Penerima pemberdayaan IKM

D. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Creswell, terdapat 6 tahapan khusus dalam penelitian kualitatif, yaitu:⁴²

- a) Pertama, dimulai dari mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran penelitian, hal tersebut berkaitan dengan jenis isu atau fenomena yang akan diteliti. Tahap ini dilakukan peneliti dengan mencari info di berbagai platform internet mulai dari *google* sampai instagram, dan pada waktu momennya Kampung Batik baru saja diresmikan sebagai Desa Devisa yang mana hal tersebut merupakan sebuah usaha yang mengenalkan batik sampai ke ranah impor selain itu juga termasuk program pemberdayaan yang menunjang pelaku IKM Kampung Batik untuk terus berkembang menyesuaikan konsumen. Kemudian penulis melihat bahwa banyak sekali program lain yang tentunya dicanangkan pemerintah yang berkenaan

⁴²Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

dengan sektor ekonomi, hal tersebut yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

- b) Kedua, literatur review, dimana pada tahap ini peneliti harus mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Penulis melihat kebanyakan penelitian terdahulu membahas mengenai strategi pemberdayaan yang mana tidak ada sisi politik dalam penelitian yang dilakukan. Adapun yang membahas mengenai strategi pemberdayaan namun masih sedikit dan belum ada yang mengkaitkan dengan politik. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi pemberdayaan kelembagaan di sektor ekonomi.
- c) Ketiga, menentukan tujuan utama penelitian, adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah penulis ingin menganalisis strategi pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik Kabupaten Tuban.
- d) Keempat, pengumpulan data, pada tahap ini mengharuskan peneliti untuk menentukan objek atau partisipan yang akan digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Perindustrian, pendamping dan pelaku IKM. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi ketempat pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, serta mengumpulkan beberapa dokumentasi pendukung dari informan.
- e) Kelima, analisis data, pada tahap ini peneliti melakukan analisis data sehingga mendapatkan gagasan atau teori baru. Data yang sudah

dikumpulkan sebelumnya kemudian dianalisis dengan menggunakan teori pemberdayaan.

- f) Keenam, pelaporan, dimana pada tahap ini peneliti membuat laporan hasil penelitiannya. Pelaporan dilakukan dengan cara presentasi dengan dosen juga pengumpulan *hardfile* dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif antara lain:

- a) Pertama, wawancara, yang bertujuan untuk mencatat opini, emosi, perasaan, dan hal lain berhubungan dengan individu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih banyak, sehingga peneliti dapat memahami kondisi sosial dan budaya informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan interview Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban sebagai pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan IKM, wawancara berjalan cukup lancar dan lama sekitar 100 menit. Kedua, penulis melakukan interview Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban sebagai pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan IKM, wawancara berjalan cukup lancar dan lama sekitar 90 menit. Ketiga, penulis melakukan wawancara dengan pendamping yang membantu pelaksanaan pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh Dinas selama 60 menit. Keempat, kepala desa yang memimpin di Kampung Batik, wawancara berjalan cukup

lancar dan lama sekitar 90 menit. Kelima, wawancara yang dilakukan dengan ketua BUMDes Margo Makmur berjalan lancar selama 40 menit. Keenam, masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan IKM Pemerintah Kabupaten Tuban, masyarakat yang dimaksud yaitu pengrajin batik, wawancara dengan masyarakat dilakukan untuk mengetahui implementasi dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat dari pemberdayaan IKM tersebut.

- b) Kedua, observasi, yang dilakukan secara langsung dengan mengamati perilaku individu dan interaksi dalam setting penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi kampung batik tepatnya pada sentra batik, observasi dilakukan untuk melihat seperti apa IKM yang diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut.
- c) Ketiga, analisis dokumen, hal ini berupa bukti yang tidak terdapat dalam interview dan observasi, namun dapat digunakan. Untuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa data file yang diberikan oleh informan kepada peneliti seperti: Rencana kerja dinas dan jumlah pengrajin batik di Kampung Batik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, baik berupa catatan, gambar, dokumen dan data lainnya yang diperiksa, disusun dan kemudian disortir di

lapangan.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisa data dari Milles yang mana terdiri dari 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian pada tahap penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Dan pada tahap menarik kesimpulan ini peneliti menverifikasi kesimpulan yang telah peneliti dapat pada tahap sebelumnya.⁴⁴

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti memilah, menyedeharnakan informasi atau data tentang pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan IKM kampung batik, dengan penekanan pada data yang sesuai dengan permasalahan yang dicari, untuk memudahkan peneliti menemukan data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara dengan terpilih informan. Peneliti menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji terkait strategi Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan IKM Kampung Batik di Kabupaten Tuban setelah di temukannya data yang cari yang peneliti peroleh pada saat penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan.

⁴³Evi Rahmawati and Bagus Kisworo, "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (2017): 161–169.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2013).

2. Display Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya menyajikan data yaitu dengan mendeskripsikan atau menulis narasi dari data yang terpilih menjadi subjek penelitian dalam kajian yang mengkaji tentang pemerintahan kabupaten dan pemberdayaan IKM Kampung Batik di Kabupaten Tuban.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah menunjukkan data yaitu menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti, dengan merumuskan data yang dihasilkan atau dengan diskusi yang dilakukan peneliti dalam penelitian, sebelum dan sesudah kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti di lapangan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data.⁴⁵ Menggunakan apa pun di luar data untuk verifikasi atau sebagai perbandingan data adalah pendekatan pemeriksaan validitas data yang dikenal sebagai triangulasi. *Pertama*, triangulasi sumber digunakan untuk menilai validitas data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan temuan wawancara dengan informasi dalam dokumen terkait. Triangulasi merupakan uji keabsahan dengan prinsip trigonometri. Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik

⁴⁵Ibid.

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. *Kedua*, triangulasi waktu juga digunakan oleh peneliti. Triangulasi waktu digunakan untuk membandingkan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Ketiga, adanya triangulasi informasi teknis. Triangulasi teknis adalah proses yang melibatkan kontras data total dengan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan satu sama lain. Idealis, agar peneliti dapat mencirikan fokus penelitian.⁴⁶

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan keabsahan data dengan mewawancarai pelaku IKM. Pelaku IKM yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Nanik Haringingsih, S.Pd dan Ibu Srinah. Peneliti menanyakan kembali beberapa pertanyaan yang telah dilakukan dalam penelitian bersama informan yang berbeda sebelumnya, hal ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih akurat.

H. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, fokus penelitian, definisi konseptual. Bagian ini akan memberikan

⁴⁶Mutiani Mutiani et al., "Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Model Transcript Based Learning Analysis (TBLA) Dalam Pembelajaran Sejarah," *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3, no. 2 (2020): 113–122.

gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara menyeluruh sehingga pembaca akan memperoleh informasi singkat dan mengajak pembaca untuk membaca lebih lanjut laporan penelitian sebab telah memahami maksud dan tujuan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan berisi tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian kali ini, kerangka teori dan kerangka berfikir. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui perbedaan dan originalitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Dalam bab II ini juga akan peneliti paparkan teori apa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini serta bagan konsep mengenai penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini akan berisi metode penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini. Bab III ini akan berisi beberapa sub-bab diantaranya yaitu a) Jenis penelitian, b) Lokasi dan waktu penelitian, c) Tahap-tahap penelitian, d) Teknik pengumpulan data, e) Teknik analisa data, f) Teknik pemeriksaan keabsahan data, g) Sistematika pembahasan

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang deskripsi umum subjek penelitian dan paparkan mengenai data dan fakta subyek penelitian, terutama yang terkait dengan rumusan masalah yang diajukan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti serta saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama di masa yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kampung Batik Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban adalah sebuah kota di Jawa Timur. Daerahnya dilalui oleh jalan daerah Surabaya - Babat - Tuban - Semarang - Jakarta dan memiliki garis pantai sepanjang 65 km. Kabupaten Tuban dilalui oleh jalan Daendels Rembang - Tuban, jalan Tuban - Babat di utara (jalan utama di bagian utara yang menghubungkan Surabaya ke Semarang dan Jakarta). Tuban memiliki kesenian khas yaitu batik tradisional buatan tangan yang dibuat dengan cara ditenun gedhog, yang kemudian dikenal dengan batik gedhog Tuban. Batik Gedhog Tuban merupakan salah satu batik Indonesia yang memiliki keunikan dalam ragam hias motif dan memiliki nilai budaya yang mempengaruhi proses pembuatan dan hasilnya. Berdasarkan sejarah perkembangan batik di masa lalu, batik gedhog Tuban dipengaruhi oleh tiga budaya besar yaitu budaya Jawa (Hindu), Islam, dan Cina.⁴⁷

Daerah utama penghasil batik Gedhog Tuban berada di kecamatan Kerek (yaitu desa Margorejo, desa Kedungrejo, dan desa Gaji) dan kabupaten Merak (yaitu desa Bongkol). Selain desa lainnya di Kecamatan Kerek, Desa Margorejo merupakan salah satu desa penghasil batik terbesar

⁴⁷Laksmi Kusuma Wardani, Ronald Hasudungan, and Irianto Sitindjak, "Batik Gedhog Tuban, East Java," 2013.

di Kabupaten Tuban. Desa Margorejo juga tetap menggunakan desain dan cara produksi tradisional. Karena lebih dari 80 persen penduduknya bekerja di sektor batik baik sebagai pelaku usaha maupun hanya sebagai pekerja, Margorejo dikenal sebagai pusat industri batik gedhog. Kecamatan Kerek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban, merupakan pusat produksi batik gedhog tuban. Dibutuhkan sekitar satu jam dan 45 km untuk menempuh perjalanan ke kecamatan Kerek dari kota Tuban. Kita bisa membayar Rp. 10.000 untuk naik angkutan umum menuju fasilitas batik gedhog, atau bisa menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota Tuban.⁴⁸

Suguhan pertama saat memasuki kawasan sentra batik gedhog Tuban akan melihat tugu batik sebeleum akhirnya memasuki gapura masuk disana juga akan melihat industri kecil dan menengah atau biasa disebut IKM. Kecamatan Kerek merupakan rumah bagi sejumlah IKM usaha kerajinan batik gedhog. Pebisnis berkolaborasi dengan para pengrajin untuk melestarikan dan memajukan batik gedhog Tuban. Ada sekitar 1.200 pengrajin di Kecamatan Kerek.⁴⁹

⁴⁸Gogot Haryo Wicaksono, "Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedhog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)" (Universitas Brawijaya, 2016).

⁴⁹Ibid.

Gambar 4. 1
Gapura Masuk Kampung Batik



Keterampilan budaya batik yang diwariskan secara turun-temurun adalah membatik gedhog Tuban. Saat ini, alat penunjang dalam keberlangsungan industri batik berupa alat tenun tradisional bukan menggunakan mesin, sedangkan bahan dari barang industri digunakan untuk membuat kreasi motif baru. Tindakan menciptakan kreasi motif baru karena metode pewarnaan bolak-balik, batik gedhog Tuban menggunakan kain tenun dan dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu 3 bulan hal ini sangat berbeda dengan pembuatan batik gedhog tradisional yang bermodal kain tenun yang hanya membutuhkan 1 minggu.⁵⁰

Batik gedhog Tuban mengandung unsur budaya dengan nilai seni yang tinggi, yang dapat dijadikan sebagai benda seni untuk keperluan peningkatan harkat dan marbat bangsa. Batik gedhog Tuban sangat menarik

⁵⁰Imroatus Sholikhah et al., "Industri Kreatif Pada Batik Tulis Tenun Gedog: Kondisi," *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2020): 198–211.

mengembangkan potensi dari batik gedhog itu sendiri. Upaya untuk memberdayakan batik dan tenun tradisional gedhog Tuban juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2018, “Kampung Wisata Batik” di resmikan oleh ketua umum Dewan Kerajinan Nasional yaitu Ibu Mufida Jusuf Kalla, selain itu pada hari yang sama juga dilakukan peresmian BUMDes “Margo Makmur” dan juga peresmian galeri yang akan dikelola oleh BUMDes. Adapun prioritas pemberdayaan utama oleh BUMDes yakni dalam bidang batik. Mulai dari pemintalan hingga menjadi batik jadi. Keberadaan Kampung Wisata Batik ini menjadi wajah baru bagi Desa Margorejo karena dianggap sebagai ikon batik di Kabupaten Tuban.⁵¹

2. Deskripsi Indutsti Kecil dan Menengah Kampung Batik

Pengrajin batik di era modern sangat berbeda dengan pengrajin batik zaman dahulu, batik sudah masuk dalam kegiatan industri. Karena pengrajin adalah orang yang bekerja di bidang kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya dengan maksud dijual untuk menghasilkan keuntungan. Akibat dari masuknya batik dalam industri modern, maka batik itu sendiri dituntut untuk memenuhi permintaan pasar.

Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Corak

⁵¹ Maryono selaku Ketua BUMDes Margo Makmur wawancara pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.50 WIB.

ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif-motif pada batik sebenarnya dapat memiliki filosofi yang bermacam-macam tergantung dari siapa dan apa tujuan dari sang pembatik.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan kebijaksanaan, bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus berwawasan budaya. Pada saat ini salah satu dinas yang diberikan kewenangan dari Pemerintah untuk mengembangkan IKM kampung batik adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2022 tentang urusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban. Maka untuk memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pembangunan industri dan perdagangan berprinsip pada wawasan budaya.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Daerah sangat memegang peran penting dalam mengola potensi yang ada pada IKM batik. Hal tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menghidupkan dan meningkatkan peran pengusaha kecil, menengah di sektor industri dan perdagangan, jasa dan pariwisata, industri rumah tangga, kerajinan dan agro bisnis agar lebih efisien, berdaya saing berdasarkan keunggulan komparatif, termasuk pengembangan pasar produk dan pusat pelayanan bagi daerah penyangga.

Sektor industri diharapkan memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19. IKM Kampung Batik terjadi pandemi covid-19 pernah melakukan ekspor ke luar negeri. Adapun salah satunya pengiriman ke negeri sakura atau Jepang, adapun batik yang dijual yakni berupa batik tenun gedhog. Batik tenun gedhog merupakan salah satu produk kain batik khas Kabupaten Tuban yang memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Untuk mendukung produk IKM batik, salah satu cara memperkenalkan batik ke dunia melalui *stakeholder* yang peranan penting yakni pemerintah, salah satu daya tarik dari penggunaan batik saat melakukan pertemuan penting yang sifatnya internasional.

3. Deskripsi Pengrajin Batik Gedhog Kampung Batik Tuban

Sejak nenek zaman moyang warga Kabupaten Tuban khususnya Kecamatan Kerek telah menciptakan batik gedhog Tuban, kerajinan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Dahulu, 100 lembar batikgedhog Tuban yang masing-masing bertema unik diberikan sebagai hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti kegiatan tanam dan panen oleh para pengrajin batik gedhog. Pengrajin gedhog biasanya menerima arahan dan instruksi dari praktisi batik yang lebih berpengalaman dan kompeten.⁵²

⁵²Judi Knight Achjadi and E.A Natanegara, *TENUN GEDHOG The Hand-Loomed Fabrics of Tuban, East Java* (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2010).

Pada tahun 1960 hingga 1970, para pengusaha batik gedhog mengalami masa kejayaan. Namun, krisis keuangan pada tahun 1980-an membuat para pengusaha batik gedhog mulai menghilang, beberapa berganti karier dan berhenti juga. Akan tetapi istimewanya pengrajin batik di Kampung Batik ini berdasarkan dari responden pegawai atau responden owner batik tanpa adanya belajat mereka bisa langsung bisa membatik. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya pengrajin batik terutama kaum perempuan. Adapun jumlah keseluruhan berbagai komoditi saat ini sebanyak 612 jumlah owner/pemilik usaha yang sampai saat ini masih memproduksi batik yakni berjumlah 20 orang yang berasal dari tiga dusun yang berada di Kampung Batik.⁵³ Adapun nama pemilik serta nama usahanya dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Owner Aktif

No.	Nama Sanggar	Owner/Pemilik Usaha
1	Batik Melati Mekar Mandiri	Nanik Hariningsih
2	Batik Surya 26/Kerompol	Srinah
3	Batik KLA	Duryati
4	Batik Terate	Darsih
5	INKA Batik	Nya'in
6	Batik Aini	Kumini
7	Alam Batik	Dussalam

⁵³ Handhi Ari Setyawan, S.H, S.E (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

8	Batik Dewi Sri	Matui
9	Batik Rasmi	Rasmini
10	Batik Fajar	Ani
11	Batik Nanik	Nanik
12	Batik Abroni	Kusmiati
13	Batik Chalik	Chalik
14	Batik Ayuningtyas	Roziatun
15	Batik Era Putri	Kusti
16	Batik Sulis	Sulistyawati
17	Batik Mak Yem	Sariyem
18	Batik Ning	Naning
19	Batik Bu Rukayah	Rukayah
20	Batik Mandiri	Darsimin

Para owner batik ini dalam proses produksi pembuatan batik dibantu oleh beberapa pengrajin yang menjadi buruh harian tetap ataupun buruh lepas. Salah satunya yaitu Nanik Hariningsih selaku owner “Batik Melati Mekar Mandiri” memberitahukan bahwa buruh batik yang dipekerjakan sebanyak 95 orang yakni untuk buruh harian tetap sebanyak 30 orang dan untuk buruh harian lepas sebanyak 65 orang. Yang mana para pekerja tersebut merupakan warga sekitar lokasi rumah produksi yaitu dari Desa Gaji, Desa Kedungrejo dan Desa Margorejo.⁵⁴

Produk batik Gedhog Tuban dipasarkan baik di dalam maupun di luar Indonesia. Batik Gedhog Tuban bisa kita beli secara lokal langsung dari pengrajin di lingkungan Kerek atau di *showroom* di pusat kota Tuban.

⁵⁴ Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner batik melati mekar mandiri wawancara pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 15.10 WIB.

Khusus untuk pemasaran *internasional*, batik gedhog dikirim ke Bali terlebih dahulu dan batik mana yang cocok untuk pasar internasional sebelum dikirim. Batik Gedhog dijual di Jakarta dan Bali untuk lokasi di luar Tuban.⁵⁵

Akan tetapi ketika covid-19 melanda Indonesia yang mana pada bidang perekonomian, tentunya pelaku IKM ini juga mengalami dampak sulitnya transaksi jual beli batik. Selama kurun waktu 2 tahun covid-19 melanda Bu Srinah selaku owner “Batik Surya 26/Kerompol” menginformasikan bahwa di tahun tersebut tidak terjadi transaksi jual beli batik darimanapun selama 2 atau 3 bulan, akan tetapi beliau tetap melakukan produksi. Akan tetapi kesulitan tersebut tidak bertahan lama karena batik yang diproduksi ini ketika masa *new normal* banyak para pembeli tingkat daerah yang melakukan pembelian guna diberikan untuk bentuk apresiasi kepada Guru atau kepada rekan kerja.⁵⁶

Kemudian yang dirasakan oleh Ibu Nanik Hariningsih selaku owner “Batik Melati Mekar Mandiri” memaparkan bahwa pada saat covid-19 beliau selaku owner IKM batik mengalami kesulitan pada tahun 2020-2021 terjadi macetnya pemasaran bahkan tidak ada transaksi jual beli sama sekali yang mana sebelumnya terjadi penjualan sampai ranah ekspor ke luar negeri dalam sekali ekspor terjual 400 potong kain batik perbulan dengan omset ratusan juta, beliau bisa mendapatkan Rp. 80.000.000 untuk

⁵⁵ibid.

⁵⁶ Srinah selaku owner Batik Surya 26/Kerompol wawancara pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 10.07 WIB.

wilayah Bali dalam satu kali transaksi jual beli. Akan tetapi beliau pada beberapa bulan selama covid-19 tetap melakukan produksi sampai pada akhirnya beliau memberhentikan sejenak para buruh pengrajin karena tidak ada pemasukan sama sekali dan untuk menghidupi kesehariannya beliau mengandalkan tabungan.⁵⁷

Kemudian setelah memasuki *new normal* terdapat pembelian besar-besaran oleh Ibu Kapolda yang melakukan pembelian kain batik dari pengrajin batik Tuban. Dalam sekali pembelian yang dilakukan mulai dari Rp. 50.000.000 – Rp. 80.000.000 dengan sejumlah batik yang di pesan sampai 50 pcs. Dampak covid-19 masih terasa hingga saat ini dikarenakan pendapatan para pengrajin batik masih mengalami naik turun.⁵⁸

4. Deskripsi Batik Gedhog Tuban

Batik Gedhog tuban merupakan suatu kerajinan yang dilakukan turun temurun. Sampai saat ini batik gedhog tuban dibuat dengan alat tenun bukan mesin terutama yang tradisional, sedangkan kreasi baru dibuat dengan bahan kain dari hasil industri. Proses pembuatan batik gedhog tuban kreasi baru dibuat selama 1 minggu sedangkan batik gedhog tuban tradisional yang menggunakan kain tenun tanpa bantuan mesin memakan waktu selama 3 bulan dikarenakan proses pewarnaan bolak-balik. Proses pembuatan batik gedhog tuban dapat dilihat dibawah ini:

⁵⁷ Nanik Hariningsing, S.Pd selaku owner batik melati mekar mandiri wawancara pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 15.10 WIB.

⁵⁸Ibid.

Meskipun daerah lain juga memiliki batik namun, batik gedhog tuban tetap mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

- a. Batik gedhog tradisional dibuat dengan tenun yang berasal dari kapas putih dan cokelat
- b. Pewarnaannya memakai pewarna alami yang didapat dari tumbuhan
- c. Motif yang unik seperti burung hong
- d. Kebanyakan batik gedhog tuban berwarna indigo

Sejarah lahirnya motif-motif unik dan khas batik gedhog tuban berawal dari motif sederhana seperti garis geometri dan vertikal lalu kekuasaan majapahit dimana tuban menjadi pelabuhan utama sampai masuknya para pedagang china, Batik gedhog juga dipakai ronggolawe dalam penyerangannya melawan majapahit melalui perang secara sembunyi-sembunyi di hutan. Akibat peristiwa itulah muncul batik dengan beraneka ragam jenis klasik dan ksatrian seperti motif grinsing, liris, bledog, dan sekar jagat. Para pedagang china pun membuat motif untuk dengan gambar burung phoenix yang menjadi legenda China.

Tuban dikenal dengan nama bumi wali karena menjadi penyebaran utama para wali songo untuk menyebarkan Islam. Sering dengan perkembangannya para perajin tuban juga membuat motif-motif yang islami seperti contohnya motif klambi wali, kinjeng miring, dan kenongo wereng, motif islami ini terlihat lebih halus dari motif batik klasik maupun ksatrian. Motif lainnya adalah motif alam seperti lereng wilis, kaktus kembang pacar yang menggambarkan suasana ala tuban. Hingga saat ini

pengembangan motif kreasi baru terus berkembang namun perajin tidak meninggalkan dan masih memodifikasi kreasi lama juga memuat kreasi baru. Dalam membuat batik gedhog para perajin melakukannya dengan cara tradisional tanpa bantuan mesin. Batik gedhog pun digunakan sebagai seragam pegawai negeri sipil, siswa-siswi sekolah serta dalam perayaan hari atas puji syukur terhadap rezeki yang didapat. Adapun cara pembuatan batik tenun gedhog sebagai berikut:

1) Menghani

Menghani adalah tahapan awal pada proses pertenunan, yaitu proses pembuatan helaian-helaian benang untuk di jadikan lungsi pada alat yang dinamai alat hani. Teknik pengerjaan menghani sebagai berikut: pertama, membuat pola ukuran panjang lungsi pada alat hani, dengan mengikuti pola kemudian benang diurai menjadi helaian-helaian. Kedua, membuat benang lungsi sesuai dengan panjang pola ukuran jumlah benang lungsi, jangan lupa silangan pada benang lungsi. Ketiga, setiap 10 benang lungsi atau sesuai keinginan, benang lungsi diikat, untuk memudahkan penghitungan benang lungsi. Keempat, apabila benang lungsinya panjang, maka harus digulung dulu dengan cara menjalin menjadi jalinan rantai agar tidak kusut kemudian lepaskan benang lungsi dari alat hani

Gambar 4. 2

Menghani



Sumber: Hasil observasi peneliti, 2023

2) Memasang benang lungsi pada bum benang lungsi

Memasang benang lungsi pada alat tenun adalah memasang helaian-helaian benang yang akan dijadikan benang lungsi pada Alat Tenun Bukan mesin pada bum benang lungsi. Proses pengerjaannya sebagai berikut: pertama, mengatur benang lungsi pada posisi kemudian membagi benang lungsi menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama masing-masing bagian. Kemudian siapkan Bum benang lungsi, putarlah engkelya sampai semua tali terurai, kemudian tariklah ke atas dan letakkan kayu bentangan yang ada pada rangkaian bum benang lungsi dan letakkan pada rangka ATBM. Ketiga, masukkan benang lungsi dari bagian tengah ke kanan, kemudian bagian tengah ke kiri, jangan lupa diselengi tali-tali yang ada pada bentangan kayu, untuk memilah-milah benang lungsi, sehingga posisi benang lungsi lebih rata. Keempat, jangan lupa, pasang dua buah kayu, untuk membuat silangan benang lungsinya, jangan sampai terlepas, posisi ini sangat menentukan

dalam pencucukan atau memasukkan benang lungsi pada mata gun dan sisir. Kelima, rapikan benang lungsi, kemudian pisah-pisahkan benang lungsi melewati raddle sesuai lebar tenunan. Enam yakni gulunglah benang lungsi pada BUM benang lungsi, sisakan panjang benang lungsi sampai batas sisir (sisa benang lungsi dapat diikatkan pada kayu bentang yang ada pada rangkaian BUM kain)

3) Pencucukan pada mata gun

Pencucukan adalah proses memasukkan benang benang lungsi ke mata gun sesuai dengan corak tenun, proses pencucukannya sebagai berikut pertama, masukkan benang lungsi ke mata gun, mulailah dari tengah ke kanan atau tengah kekiri atau sebaliknya. Kedua, masukkan pada mata gun sesuai corak yang dibuat. Ketiga, setiap beberapa helai benang lungsi (misal 10 helai saja) ikatlah hasil pencucukan, agar benang lungsi tidak lepas, sampai seluruh benang lungsi sudah masuk ke mata GUN sesuai pola pecucukan. Kemudian terakhi yakni masukkan benang lungsi satu persatu ke sisir, mulailah dari tengah ke kanan kemudian tengah kekiri atau sebaliknya.

4) Pencucukan pada sisir

Pencucukan adalah proses memasukkan benang benang lungsi ke sisir sesuai dengan corak tenun, proses pencucukannya sebagai berikut pertama, masukkan satu persatu benang lungsi ke SISIR, mulailah dari tengah ke kanan atau tengah kekiri atau sebaliknya. Kemudian, setiap beberapa helai benang lungsi (misal 10 helai saja) ikatlah hasil

pencucukan, agar benang lungsi tidak lepas, sampai seluruh benang lungsi sudah masuk ke SISIR sesuai pola pecucukan.

Gambar 4. 3
Pencucukan Pada Sisir



Sumber: Hasil observasi peneliti, 2023

5) Mengikat benang lungsi pada bum kain

Mengikat benang lungsi pada bum kain dilakukan setelah benang lungsi dicucuk melalui mata gun dan sisir. Proses pengikatannya sebagai berikut pertama, putarlah BUM kain. Sampai semua tali terurai. Kedua, ikatlah benang lungsi pada bentangan kayu yang ada pada rangkaian BUM kain. Ketiga, mulailah ikatan dari tengah, ke tepi kanan, tengah ke tepi kiri baru bagian-bagian yang lain sampai semua benang lungsi terikat. Empat, ikatlah benang lungsi sedikit demi sedikit (misal setiap 10 benang lungsi kemudian di ikat) agar jarak antara ikatan satu dengan ikatannya tidak terlalu longgar. Kelima, usahakan

ketegangannya sama. Terakhir lakukan sampai semua benang lungsi terikat

6) Penyetelan

- a) Berilah nomor GUN 1,2,3,4 dan INJAKAN juga 1,2,3,4 untuk memudahkan dalam penenunan
- b) Cermati hasil pencucukan, apakah sudah benar
- c) Atur posisi Gun dan injakan, Gun 1 dengan injakan 1, gun 2 dengan injakan 2, gun 3 dengan injakan 3, gun 4 dengan injakan 4
- d) Aturilah ketegangan ikatan benang lungsi, usahakan sama ketegangannya
- e) Siap menenun

7) Menenun

- a) Awali dengan tenun sebagai bantuan saja, sampai posisi susunan benang lungsi sudah rata
- b) Ketika menenun usahakan jarak gunung-gunung sama, sehingga hasil lebar tenunan dapat rata kanan dan kiri
- c) Sambungan benang usahakan maju dari tepi tenunan kira-kira 2-3 cm
- d) Memadatkan tenunan dengan sisir juga harus sama, kalau 2 kali ketukan juga sebaiknya semua 2 kali ketukan “dog-dog”, sehingga hasil kerapatan tenunan juga rata
- e) Tenun sesuai motif dan ukuran produk yang akan dibuat

- f) Kalau mulut benang lungsi sudah sempit, gulung hasil tenunan
 - g) Tenun sampai mencapai ukuran yang dikehendaki
- 8) Melepas tenun
- a) K endorkan tenunan terlebih dahulu
 - b) Potong benang lungsi, kalau bisa, sisakan benang lungsi pada cucukan GUN, dengan cucukan sisa, masih dapat digunakan lagi
 - c) Lepaskan hasil tenunan, dengan membuka ikatan-ikatan benang lungsi
 - d) Rapiakan hasil tenunan, bagian rumbai dapat disimpul

B. Analisis dan Pembahasan

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik

Pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki daya atau kekuatan.⁵⁹ Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peran serta lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dalam pembinaan bangsa selaras dengan makna

⁵⁹ Suhermanto, "Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

pembangunan menurut Totok Mardikanto yakni upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara-terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk menganalisis strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui IKM di Kampung Batik dapat dikaji dengan definisi pemberdayaan menurut Robert Chambers yang menyatakan bahwa “pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya mencakup nilai-nilai sosial. Konsep tersebut menciptakan paradigma baru dalam pembangunan, yaitu berpusat pada manusia (*people centred*), partisipatif (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*) dan berkelanjutan (*sustainable*)” hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Berpusat pada manusia (*people centred*)

Permasalahan yang dihadapi negara-negara dunia ketiga (negara-negara berkembang) termasuk Indonesia adalah masalah keterbelakangan. Indikator-indikator keterbelakangan masyarakat ditandai dengan rendahnya pendapatan, rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak

dibarengi oleh penyerapan tenaga kerja, kemampuan untuk mendapatkan kesehatan rendah, dan lain sebagainya. Dan, dari berbagai indikator tersebut, SDM menjadi indikator yang paling berpengaruh terhadap indikator-indikator lainnya.

Keterbelakangan atau kerap disebut kemiskinan merupakan akibat dari pembangunan yang menggunakan pendekatan *bottom up* yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, yakni pendekatan dan orientasi yang mementingkan hasil dan mengabaikan masyarakat mayoritas dalam proses. Sehingga, masyarakat mayoritas terbelenggu dalam ide dan kreativitas (pasif), kurang dalam pengetahuan dan pengalaman.

Konsep paradigma Chambers mengenai *people centred* dapat di pahami bahwa pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, populasi yang rentan, dan meningkatnya pengangguran dalam situasi ini memerlukan perhatian khusus karena dapat menyebabkan ketidakstabilan, yang memiliki dampak yang merugikan seperti melemahnya ikatan sosial dan nilai serta interaksi antar individu. Oleh karena itu, prinsip inti dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah dedikasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan tidak mengecualikan orang miskin, meningkatkan integrasi sosial dengan politik yang berdasarkan hak asasi manusia,

nondiskriminasi, dan menawarkan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.⁶⁰

Tujuan akhir dari strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah untuk meningkatkan taraf hidup setiap orang dengan mempertimbangkan tradisi budaya dan kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan utama strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah untuk memberantas kemiskinan absolut, mencapai keadilan distributif, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat yang nyata. Prioritas pertama diberikan kepada daerah tertinggal dan kelompok masyarakat yang berisiko terkena dampak, seperti perempuan, anak-anak, lansia, generasi muda yang tidak mampu, dan kelompok marjinal lainnya.⁶¹

Selain pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, juga muncul strategi yang berpusat pada rakyat. Model pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas manusia lebih penting daripada sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini karena peningkatan kualitas manusia akan menyebabkan partisipasi yang

⁶⁰ Kamaruddin Hasan, "Komunikasi Sosial Dan Pembangunan (KSP) People Centred Development (Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat)," in *Teaching Resource* (Repository Universitas Malikussaleh, 2019), 1–9.

⁶¹ Ibid.

lebih besar dalam berbagai kegiatan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi.⁶²

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Dalam hal ini peneliti memperoleh data bahwa pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik pada zaman dahulu telah berdaya atau melakukan upaya untuk mengembangkan potensi dari batik yang dimiliki di Kampung Batik tersebut, pelaku IKM di Kampung Batik telah lebih dulu melakukan upaya pemberdayaan dengan menjalin hubungan jual-beli dengan negara luar salah satu sasaran pasar dagang dari tenun dan batik gedhog Kampung Batik yakni Jepang, di Jepang pangsa pasar dan harga tenun gedhog bagus sekali karena di sana dibuat untuk bahan baku kimono. Yang mana upaya tersebut tidak termasuk dalam kategori program yang dilakukan pemerintah.⁶³

Sebelum resmi menjadi Kampung batik, pelaku IKM di desa Margorejo melakukan upaya pengembangan untuk mengenalkan produknya melalui transaksi jual beli di tingkat lokal kecamatan. Melalui transaksi di tingkat lokal akhirnya mengantarkan batik gedhog kembali diminati oleh masyarakat. Transaksi jual beli yang

⁶² Aziz Muslim, "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 7, no. 2 (2020): 89–103.

⁶³ Junaedi (Kepala Desa Kampung Batik) wawancara pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

dilakukan oleh Ibu Srinah yakni pada mulanya menjalin kerjasama selain untuk mengembangkan potensi yang dimiliki juga membagi keuntungan dengan partnernya yakni seorang guru yang mana relasinya akan cukup banyak dari pada Ibu Rumah Tangga biasa. Rekan pelaku IKM disini memiliki kemampuan pengetahuan yang mumpuni sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar terjadinya proses transaksi jual beli.⁶⁴

Dalam hal ini diketahui bahwa untuk menjadikan individu-individu dalam masyarakat sebagai aktor dan penentu pembangunan harus diimbangi dengan upaya memperkuat kemampuan dan posisi tawar (penguatan kapasitas) masyarakat yang menjadikan mereka lebih berdaya. Prakarsa dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kapasitas (pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan). Karena, menurut Eltizoni dalam Polama menyampaikan bahwa pengetahuan dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan, terutama melalui komitmen-komitmen masyarakat yang abstrak dan samar yang arahnya ditentukan oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dianut oleh pelaku, diterjemahkan kedalam komitmen-komitmen spesifik pada rangkaian tindakan yang lebih spesifik. Proses pengambilan keputusan yang begitu rumit hampir tidak mungkin dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat yang kurang

⁶⁴ Srinah selaku Owner Batik Surya/Kerompol wawancara pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 10.15

dalam kesadaran. Oleh karena itu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan harus didahului dengan penguatan kapasitas dalam hal kesadaran.

Pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha, dan kapasitas lingkungan akan menjadi efektif apabila ada ketersediaan lembaga (*institution*), baik yang bersifat formal maupun non formal atau institusi sosial berupa pranata-pranata sosial yang memfasilitasi berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pada tahun 2018 ada peninjauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap potensi batik, hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria penyematan Kampung batik sebagai ikon Kabupaten Tuban serta menjadi cagar budaya Kabupaten Tuban. Penyematan Kampung batik ini dilakukan oleh dewan kerajinan nasional atau Dekranasda yang pada saat itu diketuai oleh ibu Mufidah Jusuf Kalla, selain menyematkan nama Kampung batik. Ketua Dekranasda tersebut juga melakukan peresmian BUMDes “Margo Makmur” sebagai upaya untuk mewadahi para pelaku IKM batik.⁶⁵

Setelah melihat adanya potensi yang dimiliki oleh Kampung batik ketua dekranasda tersebut meninjau ulang kepada pemerintah daerah agar segera melakukan upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Hal tersebut dilakukan pada saat setelah penyerapan aspirasi yang dilakukan ketika peresmian BUMDes.

⁶⁵ Sonif Efendi (Ketua BUMDes) wawancara pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 09.40 WIB

Dilakukan peresmian bumdes serta peresmian Kampung batik di desa Margorejo tersebut mengadakan acara *car free day* yang atau memamerkan batik yang dibuat sepanjang jalan yang akan dilewati menuju BUMDes, selain itu masyarakat juga menjual jajan pasar serta kerajinan tangan berupa tas maupun dompet.⁶⁶

Kemudian setelah diresmikannya menjadi Kampung batik pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dengan melakukan pemberian tenda untuk fasilitasi *car free day* yang diadakan setiap hari Minggu. Akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kala itu hanya terfokus pemberian fasilitasi bukan untuk pengembangan lebih lanjut industri kecil menengah di kampung tersebut. Program tersebut hanya berjalan selama kurun waktu 3 bulan dikarenakan pada tahun 2018 tersebut terdapat kontestasi politik pemilihan kepala desa, yang mana pada kedua kandidat yang menjadi calon kepala desa memiliki pendukung yang bertolak belakang dengan adanya pemberdayaan melalui *car free day*.⁶⁷

Dalam hal ini pelaku IKM harus melakukan survive kembali mengenai pengembangan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta meningkatkan jual beli produk batik gedhog yang diproduksi. Dalam pelaksanaan programnya selain terkendala karena

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid

adanya kontestasi politik juga terkendala karena adanya pandemi covid yang mulai memasuki wilayah Kabupaten Tuban.

Setiap desa memiliki pendapatan daerahnya masing-masing yang mana pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa.⁶⁸ Akan tetapi di desa Margorejo atau Kampung batik tersebut alokasi dana yang dimiliki lebih diprioritaskan untuk pembenahan saluran irigasi untuk pertanian di daerah tersebut.

Pada pandemi Covid-19 akan tetapi juga menyebabkan yang semula pengembangan yang dilakukan oleh individu tersebut harus terhenti kembali dan harus mengalami pengurangan produksi bahkan pengurangan karyawan. Pada saat pandemi Covid-19 pemerintah Kabupaten memprioritaskan dana untuk pengembangan maupun pemberdayaan untuk dialihkan kepada pemberian bantuan kepada orang yang lebih terdampak.

Selain itu terjadi tarik ulur pendapat mengenai pemberdayaan yang layak yang diberikan untuk pelaku ikm di Kampung batik. Kepala desa yang menaungi Kampung batik berpendapat bahwa dengan adanya program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau komunitas yang mendukung perkembangan pelaku ikm itu tidak dibutuhkan Karena pada dasarnya masyarakat di Kampung

⁶⁸ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45

batik sudah memiliki keistimewaan berdasarkan dari responden pegawai dan dari pengrajin batik atau owner tanpa adanya belajar para masyarakat di Kampung batik langsung bisa membuat batik itu dari kalangan sekolah dasar sampai dengan lansia. Beliau juga menambahkan bahwa pemberdayaan yang seharusnya dilakukan itu berkonsentrasi kepada manajemen pemasaran yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang masih sulit untuk diatasi baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa, sehingga ketika diadakan pelatihan di daerah tersebut atau di Kampung batik pemerintah desa melakukan penolakan.⁶⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh pelaku IKM di Kampung batik salah satunya Ibu Srinah, bahwa pada saat ada mahasiswa atau komunitas yang ada di Kabupaten Tuban akan mengadakan program pelatihan akan ditolak jika dilakukan di kantor balai desa, jadi pada saat pelaksanaan pelatihan baik pemerintah daerah maupun komunitas atau PKM langsung dilaksanakan di sentral batik yang ada di Kampung batik.

Hal mengingat manusia pada hakekatnya harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mereka capai dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan oleh setiap aspek masyarakat baik *top down* dari organisasi atau pemerintah kepada masyarakat, maupun *bottom up* dari masyarakat itu sendiri

⁶⁹ Junaedi (Kepala Desa Kampung Batik) wawancara pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 11 WIB

yang mempunyai keinginan untuk menjadi masyarakat yang mampu hidup sejahtera.

Adapun pada era sekarang ini, batik menjadi salah satu agenda prioritas yang perlu diberdayakan karena selain menjadi ikon dari Kabupaten Tuban juga merupakan warisan budaya yang dinilai memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional. Hal ini dapat dibuktikan melalui Desa Margorejo atau Kampung Batik merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran realisasi program Desa Devisa, dengan alasan bahwa Kampung batik memiliki potensi besar untuk mengembangkan batik tulis tenun gedhog yang sangat memungkinkan dijadikan komoditas ekspor. Selain itu program Desa Devisa ini menjadi penguat batik gedhog sebagai salah satu industri kreatif di Kabupaten Tuban.⁷⁰

Peresmian program Desa Devisa ini mampu menjadi salah satu alternatif perbaikan perekonomian di Kampung Batik yang mana sebelumnya mengalami jumlah permintaan dari tenun dan batik gedhog mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, hal tersebut menjadi harapan bagi para pengrajin Kampung Batik karena masih mengalami masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.⁷¹ Selain program Desa Devisa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi bersama LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), Pemerintah

⁷⁰ Sonif Efendi (Ketua BUMDES) wawancara pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 09.40 WIB

⁷¹ Nanik Hariningsih, S.Pd., (Owner Melati Mekar Mandiri) wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

Daerah juga mendukung potensi yang dimiliki oleh Kampung Batik. Potensi yang dimiliki oleh pelaku IKM di Kampung Batik salah satunya terbukti dari motif yang diciptakan yang menampilkan ciri khas serta bahan yang tentunya berbeda dari batik daerah lainnya.

Pemerintah Daerah melalui instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban memberikan beberapa program pemberdayaan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H., beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menggagas 4 program untuk pemberdayaan industri batik yaitu batik mark, sertifikasi pengrajin, sertifikasi merek atau motif atau motif dan program bantuan sarpras berupa bahan atau alat.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam strategi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini melalui beberapa program diantaranya batik mark, sertifikasi pengrajin, sertifikasi merek atau motif dan program bantuan sarpras berupa bahan atau alat.

Kemudian program selain Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdapat juga instansi terkait yang melakukan pemberdayaan masyarakat IKM akan tetapi tidak terfokus kepada

⁷² Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

IKM Kampung Batik sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Berkaitan dengan program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan disampaikan oleh Ibu Martha Nuringati Agustya, S.E., sebagai berikut:

“Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dalam upaya pemberdayaan untuk IKM di Kampung Batik DISKOPUMDAG hanya memberikan fasilitasi, fasilitasi disini juga berupa pameran tingkat kabupaten, serta memberikan akomodasi untuk pameran tingkat provinsi saja. Dikarenakan kami lebih fokus kepada UMKM makanan dan minuman dan PKL.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan bentuk untuk mendukung pembangunan dengan model *people centred* yang mana dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan penuh para pelaku IKM di Kampung Batik, yang mana hal tersebut dirasakan langsung dampaknya oleh sasaran yakni masyarakat. Model strategi pembangunan yang berpusat pada manusia dalam pernyataan diatas termasuk kedalam masyarakat yang mana fokus setral dan tujuan terakhir pembangunan, karena itu dalam program yang dilakukan oleh pemerintah ini memerlukan partisipasi masyarakat untuk segala aspek dan hanya sedikit orang yang

⁷³ Martha Nuringati Agustya, S.E., (Pengelola pembinaan dan Pengembangan Perekonomian staff di Bidang UMKM) wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 11.13 WIB

menyangkal nilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan diuntungkan. Berbeda dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan bahwa untuk program pemberdayaan IKM di Kampung Batik itu tidak ada melainkan hanya pemberian fasilitasi umum yang juga semua jenis IKM pasti mendapatkan.

Berdasarkan konsep *people centred* yang digagas oleh Chambers bahwa konsep pemberdayaan masyarakat akan menekan pada masyarakat, dalam hal ini bertujuan memperkuat kapasitas (kemampuan), baik yang bersifat pengetahuan (*knowlage*) dan keterampilan (*skill*) maupun pengalaman.⁷⁴

b) Partisipatif (*participatory*)

Pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik melalui program-program yang telah digagas oleh pemerintah. Adapun model strategi pemberdayaan masyarakat menurut Chambers yang penulis maksudkan, yaitu melalui tangan kanan Pemerintah Daerah yakni instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dapat menjadi *stakeholder* dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dengan memberikan program-program pendukung diantaranya batik mark,

⁷⁴ Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang/Robert Chambers*.

sertifikasi pengrajin, sertifikasi merek atau motif, program bantuan sarpras berupa bahan atau alat, kemitraan dan pelatihan.

Selain itu, terdapat prinsip yang dikemukakan oleh Chambers sebagai penekanan dalam memahami pemberdayaan partisipatif yang penulis ambil yaitu pemberian fasilitas yang artinya memberikan fasilitas untuk pelaku IKM di Kampung Batik itu sendiri, kesadaran dan tanggung jawab yang artinya fasilitator secara terus-menerus menguji tingkah laku masyarakat dalam proses pelaksanaan program sebagai bentuk pembelajaran, dan saling berbagi informasi dan gagasan antar pelaku IKM di Kampung Batik, pelaku IKM dengan fasilitator, dan antar fasilitator.⁷⁵ Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dapat menjadi jembatan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Hal tersebut bertujuan untuk kelancaran pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Gagasan di balik pemberdayaan adalah bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketika masyarakat menunjukkan minat untuk melakukan pembangunan, komunikasi dengan sendirinya akan mulai berkembang. Hal ini disebabkan karena

⁷⁵ Ibid.

masyarakat akan beroperasi baik sebagai subyek yang menggerakkan kegiatan ekonomi maupun sebagai agen pertumbuhan. Tentu dengan hal tersebut akan menimbulkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya melakukan pembangunan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik memahami bahwa partisipasi yang dimaksudkan yakni andilnya masyarakat dalam proses pemecahan masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pemilihan serta pengambilan keputusan terhadap solusi dan penanganan masalah, pelaksanaan serta evaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H., bahwa:

“... diperlukan andil masyarakat yaitu pelaku IKM sendiri dalam menerima program yang digagas oleh pemerintah. Dikarenakan dalam pelaksanaan pemberdayaan sendiri keberhasilan dari program dilihat dari tingkat partisipasi dari pelaku IKM dalam merespon program yang dilakukan.”⁷⁶

Kemudian tanggapan lain yang diberikan oleh Ibu Martha Nuringati Agustya, S.E., sebagai berikut:

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dilihat berdasarkan respon tindakan dalam menanggapi sosialisasi program yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun partisipasi lain yakni dengan menyuarakan bahwa apakah program yang digagas ini merupakan solusi dari masalah yang dihadapi atau tidak, jika tidak maka diperlukan lagi cara atau strategi yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut.”⁷⁷

⁷⁶ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

⁷⁷ Martha Nuringati Agustya, S.E., (Pengelola pembinaan dan Pengembangan Perekonomian staff di Bidang UMKM) wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 11.13 WIB

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbentuk swadaya murni oleh masyarakat itu sendiri, bebas dari tekanan luar. Karena masyarakat berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah ke tingkat kesejahteraannya, hal ini akan membantu program-program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Partisipasi merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran.

Conyers menguraikan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting untuk pembangunan, dengan mencantumkannya sebagai berikut: 1) Tanpa partisipasi masyarakat, proyek pembangunan tidak dapat berhasil, 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa terlibat dalam tahapan perencanaan, dan 3) Masyarakat akan lebih diuntungkan dari proyek pembangunan jika mereka merasa memiliki suara dalam proses pembangunan.⁷⁸

Dalam pelaksanaan program yang melibat partisipasi masyarakat khususnya dalam penelitian ini yakni pelaku IKM di Kampung Batik adapun pelaku IKM sendiri yang menerima program

⁷⁸ Habib Muhsin Syafingi, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Alan Bayu Aji, "Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 2 (2019): 139–149.

yakni IKM yang termasuk dalam kategori binaan Dinas. Dalam implementasi binaan terhadap IKM di Kampung Batik, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H beliau mengatakan bahwa:

“Program dinas untuk IKM itu ada empat yaitu batik mark, sertifikasi pengrajin, sertifikasi merek atau motif atau motif dan program sarpras lainnya berupa bantuan bahan atau alat. Untuk program batik mark sendiri ini termasuk salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa batik yang diproduksi oleh Kampung Batik Desa Margorejo merupakan asli batik, memberikan jaminan mutu batik sehingga mendapatkan sertifikat. Sertifikasi ini berguna untuk menarik konsumen bahwa produk yang dibeli merupakan batik asli, bukan batik modern seperti eco-print. Program batik mark merupakan ini merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian, jadi dinas memberikan pembinaan di bidang sertifikasi Batik Mark kepada pelaku IKM. Dalam pelaksanaan program batik mark ini Dinas akan mengundang tim penguji dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, untuk mengetahui secara langsung proses mulai dari proses pembuatan hingga menjadi batik. Kemudian batik tersebut akan dibawa di Lab BBKB untuk diuji yang kemudian jika sudah teruji kevalidannya, BBKB akan mengeluarkan sertifikat.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan berupaya memberikan keuntungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menggerakkan, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pengembangan masyarakat menjadi peran penting bagi pengelola pembangunan. Dalam rangka membantu, menggairahkan, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat, upaya

⁷⁹ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, dan prakarsa pembangunan pemerintah.

Kemudian dalam pelaksanaan program kedua yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yakni program sertifikasi pengrajin, hal ini disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H yang menjelaskan bahwa:

“Program kedua yaitu sertifikasi pengrajin, DISNAKERIN memberikan fasilitasi berupa proses pewarnaan dan proses pembuatan motif. Pelaku IKM Kampung Batik yang ikut serta dalam pelaksanaan program ini ada Bu Srinah dan Pak Dussalam. Karena terbatasnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tuban terdapat 5 orang yang didatangi untuk ikut serta program batik mark, untuk sertifikasi pengrajin ada 10 orang yang mana 2 diantaranya berasal dari Kampung Batik yang kemudian dikirim ke Yogyakarta ke BBKB untuk mengikuti proses agar mendapatkan sertifikat. Adapun pada saat kegiatan untuk mengikuti sertifikasi tadi, ada pendamping dari dinas yang mendampingi saat kegiatan disana. Untuk membantu dan memonitoring langsung terkait pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh BBKB.”⁸⁰

Artinya bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah melakukan program dalam memberdayakan masyarakat melalui IKM Kampung Batik dengan mengimplementasikan program yang kedua yaitu sertifikasi pengrajin, melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan di Balai Besar Kerajinan dan Batik ini terdapat pendamping yang mendampingi pelaku IKM untuk proses mendapatkan sertifikasi.

Dalam pelaksanaan program yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga dibantu oleh pendamping agar bisa

⁸⁰ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

memonitoring langsung dan menjadi mentor untuk pelaku IKM. Pendamping ini menunjukkan bahwa sudah melakukan tugasnya dalam hal monitoring dengan cara memantau kinerja dari para IKM binaan dinas bisa lebih terpantau dan terarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendra Wahyudi yang menjelaskan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan sertifikasi pengrajin, dinas menunjuk pendamping untuk melakukan pendampingan langsung pada saat kegiatan sertifikasi pengrajin yang dilakukan di BBKB. Yang mana tujuan dari adanya kami sebagai pendamping, agar pelaku IKM setelah mendapat sertifikasi ini akan lebih terpantau dan terarah. Kami memberikan pendampingan seperti mengikuti kegiatan pelaksanaan sertifikasi ini agar fungsi manajemen IKM dijalankan.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendamping disini membantu pembinaan langsung serta mendampingi kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui IKM Kampung Batik dengan memonitoring langsung kegiatan sertifikasi pengrajin yang diikuti oleh pelaku IKM Batik di BBKB Yogyakarta.

Pelaku IKM Batik sangat antusias dalam menerima program sertifikasi pengrajin ini karena menurutnya Pemerintah juga menunjukkan bentuk dukungan dengan cara turut andil melaksanakan tugasnya dengan baik untuk pelaku IKM agar terus bisa lebih mandiri setelah mengikuti program sertifikasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh

⁸¹ Hedra Wahyudi (Pendamping IKM) wawancara pada tanggal 13 Desember 2022 Pukul 10.10 WIB

Ibu Srinah selaku pelaku owner Batik Surya atau Kerompol menjelaskan bahwa:

“Untuk pemberdayaan IKM itu lebih banyak dukungan yang dilakukan oleh Dinas, ada dua dinas yang memberikan dukungan penuh kepada kami pelaku IKM yaitu DISNAKERIN dan DISKOPUMDAG. Kemarin saya mendapatkan program dari DISNAKERIN untuk mengikuti sertifikasi pengrajin di BBKB Yogyakarta, semuanya ditanggung oleh DISNAKERIN Mbak. Mulai dari akomodasi sampai penginapan. Dari IKM Kampung Batik ini ada dua yaitu saya dan Pak Dussalam, saya disana di dampingi oleh tim dari dinas untuk membantu saya dalam kegiatan tersebut untuk mendapat sertifikasi.”⁸²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam peran implementor yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta pendamping, sangat disambut oleh pelaku IKM. Antusiasme yang dirasakan oleh pelaku IKM ini merupakan bentuk manfaat dari program yang dilakukan sehingga menarik partisipasi pelaku IKM di Kampung Batik. Karena bagi pelaku IKM hal ini sangat membantu pelaku IKM bisa lebih eksis dan terus meningkatkan keberadaan IKM bisa membantu memulihkan perekonomian warga sekitar dan bahkan perekonomian daerah pasca Covid-19.

Dapat diketahui bahwa kegiatan diatas merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu proses salah satunya partisipasi pelaksanaan kegiatan. Menurut Aprelia Theresia terdapat beberapa lingkup partisipasi. Lingkup partisipasi dimaksud adalah: (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (b) Partisipasi dalam

⁸² Srinah selaku Owner Batik Surya/Kerompol wawancara pada 28 Desember 2022 Pukul 10.15 WIB

pelaksanaan kegiatan; (c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; (d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.⁸³

Adapun program selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yakni sertifikasi merek atau motif atau motif. Implementasi program ini dinas melakukan kunjungan serta memberikan fasilitasi kebutuhan penunjang sertifikasi merek atau motif, yang mana dalam implementasinya berupa pemberian fasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku IKM ini termasuk kedalam program yang keempat yakni bantuan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan IKM.

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui IKM Kampung Batik, hal ini untuk mendukung berjalannya program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam implementasi program yang disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program selanjutnya yaitu sertifikasi merek atau motif atau motif, DISNAKERIN rutin melakukan kunjungan kepada IKM yang menjadi binaan dinas termasuk memfasilitasi yang pelaku IKM butuhkan yang kaitannya untuk membantu mendapatkan program ekspor dari KEMENKEU. Kabupaten Tuban terdapat 2 desa yang ditetapkan sebagai Desa Devisa yaitu Desa Margorejo dengan Ibu Nanik dan Desa Kedungrejo itu Ibu Uswatun. Untuk mendapat pendampingan dari LPEI yang mana tujuannya untuk bisa mengangkat produknya ke ranah ekspor. Kegiatan pendampingan dari LPEI tersebut dilakukan di Surabaya selama 3 hari. Adapun yang

⁸³ Suryo Sakti Hadiwijoyo and Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

sudah mendapatkan sertifikasi motif batik di Kabupaten Tuban sebanyak 40 IKM.”⁸⁴

Gambar 4. 4

Jumlah Motif Bersertifikat

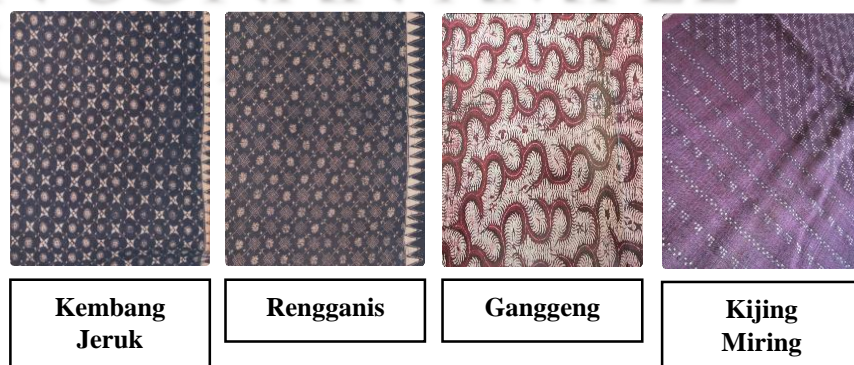


Sumber: Hasil Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan, 2023

Berikut merupakan beberapa motif batik yang telah disahkan

Gambar 4. 5

Motif-Motif Batik Tersertifikat



⁸⁴ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.



Sumber: Hasil Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa yang dilakukan oleh dinas dalam pelaksanaan program selanjutnya yakni sertifikasi merek atau motif dan program bantuan sarana prasarana melibatkan para pelaku IKM. Sertifikasi merek atau motif merupakan sebuah tanda sertifikasi yang menyatakan sifat atau asal barang atau jasa yang telah diterapkan. Sebuah tanda sertifikasi pada produk komersial dapat menunjukkan bahwa adanya tindak lanjut atau sertifikasi produk kesepakatan antara produsen produk dan BSKJI melalui Balai Besar Kerajinan Batik (BBKB) untuk pengujian dan sertifikasi. Kemudian, menunjukkan bukti hukum bahwa produk telah berhasil diuji sesuai dengan nasional terakreditasi standar dan berhasil diuji identik dengan apa yang sedang ditawarkan untuk dijual.

Pada saat pelaksanaan program sertifikasi merek atau motif ini selain peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga terdapat peran pendamping dalam mendampingi langsung ketika pelaksanaan program berlangsung, pendamping bertugas mendampingi *step by step* yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat dari BBKB Yogyakarta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendra Wahyudi yang menjelaskan bahwa:

“Mengenai program sertifikasi merek atau motif ini pendamping juga turut andil untuk mendampingi keberlangsungan dari proses program yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Tidak jauh beda dengan pelaksanaan program sertifikasi pengrajin, pendamping memberikan pendampingan seperti mengikuti kegiatan pelaksanaan sertifikasi ini agar fungsi manajemen IKM dijalankan.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendamping sebagai implementor disini membantu pembinaan langsung serta mendampingi kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui IKM Kampung Batik dengan memonitoring langsung kegiatan sertifikasi merek atau motif yang diikuti oleh pelaku IKM Batik di BBKB Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan program sertifikasi merek atau motif ini pelaku IKM di Kampung Batik yang mengikuti program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pelaku IKM sangat merasa terdukung karena selain sebagai bentuk jaminan kualitas, juga membantu pelaku

⁸⁵ Hedra Wahyudi (Pendamping IKM) wawancara pada tanggal 13 Desember 2022 Pukul 10.10 WIB

IKM untuk berinovasi membuat banyak motif terus menerus sampai pada akhirnya mengantarkan pelaku IKM kedalam kriteria yang mendukung untuk ekspor ke luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nanik Hariningsih S.Pd selaku Owner Batik Melati Mekar Mandiri beliau menjelaskan bahwa:

“Program sertifikasi merek atau motif ini menjadikan kami lebih banyak menciptakan inovasi motif baru, yang mendukung kami para pelaku IKM memiliki produk yang tersertifikasi jaminan kualitas, lulus uji sesuai dengan nasional terakreditasi standar dan mendapatkan perlindungan atas motif saya. Sehingga saya termasuk salah satu IKM dari Kampung Batik yang mengikuti program Desa Devisa. Sebelum melakukan ekspor kami pelaku IKM difasilitasi pelatihan oleh LPEZ untuk ekspor batik, hal ini sangat mendukung IKM batik untuk kembali eksis karena tahun-tahun kemarin sempat macet karena covid-19.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan program sertifikasi merek atau motif ini menjadi jembatan pelaku IKM Kampung Batik yakni Ibu Nanik selaku owner Melati Mekar Mandiri, untuk lolos sebagai salah satu IKM yang memperoleh program Desa Devisa dari Pemerintah Provinsi.

Kemudian selain pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdapat peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang dalam proses pemberdayaan juga mengutamakan partisipasi masyarakat yakni pelaku IKM di Kampung Batik. Adapun program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik yakni

⁸⁶ Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner Melati Mekar Mandiri wawancara pada 9 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

berupa program pelatihan dan kemitraan. Hal ini disampaikan oleh

Ibu Martha Nuringati Agustya, S.E., bahwa:

“Dalam pengimplementasian program yang digagas DISKOPUMDAG yakni pertama fasilitasi kemitraan, yang mana fasilitasi kemitraan ini pelaku IKM akan terbantu dalam kerjasama yang dilakukan dengan salah satu perusahaan industri di Kabupaten Tuban yaitu Semen Indonesia. Seperti yang dirasakan langsung oleh Ibu Nanik, beliau merupakan salah satu pelaku IKM yang menjadi mitra binaan industri PT. Semen Indonesia yang banyak mendapat bantuan berupa fasilitas untuk menunjang pemberdayaan ekonomi pada produknya”.⁸⁷

Maka dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini mengutamakan tujuan dari pemberdayaan sendiri yakni selain menjalin partisipasi pelaku IKM juga mendukung kemajuan pelaku IKM melalui rekomendasi agar pelaku IKM menjalin mitra dengan perusahaan yang berpotensi dalam mendukung kebutuhan untuk pengembangan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan program kemitraan diharapkan sesuai dengan tujuan pemberdayaan yaitu untuk memperkuat pelaku IKM di Kampung Batik agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat menghadapi perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian individu maupun daerah.

⁸⁷ Martha Nuringati Agustya, S.E., (Pengelola pembinaan dan Pengembangan Perekonomian staff di Bidang UMKM) wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 11.13 WIB

c) Pemberdayaan (*empowering*)

Dalam pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik dalam pelaksanaan model pemberdayaan ketiga menurut Chambers yakni *empowering* (upaya untuk memberdayakan masyarakat).

Empowering dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: 1) *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. 2) *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam *empowerment* ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti

ini. 3) *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.⁸⁸

a) *Enabling*

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemungkinan yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pelaku IKM di Kampung Batik. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berperan melakukan mediasi dan negosiasi, serta melakukan manajemen sumber. Tugas utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam pemberdayaan IKM di Kampung Batik ini berupaya menciptakan kondisi dengan mengoptimalkan potensi Kampung Batik pada pelaku IKM.

Untuk mengoptimalkan potensi IKM di Kampung Batik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menggunakan program sertifikasi pengrajin sebagai strategi pengoptimalan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H bahwa:

“Sertifikasi pengrajin itukan bertujuan untuk menambah kapasitas Sumber Daya Manusia nya para pengrajin. Dengan fasilitasi yang diberikan berupa teknis pewarnaannya yang

⁸⁸ Anita Tri Widiyawati, “Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi Pada Perpustakaan Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember),” *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 77.

baik seperti apa mereka diberitahu sampai ke pembuatan motifnya yang diberikan oleh tim dari BBKB Yogyakarta.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa *enabling* sebagai salah satu yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peluang yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik karena dapat mempengaruhi bagaimana proses pemberdayaan pelaku IKM di Kampung Batik berlangsung. Pemungkinan yang dilakukan oleh dinas untuk mengoptimalkan potensi IKM Kampung Batik melalui sertifikasi pengrajin yang dilakukan oleh pelaku IKM di BBKB Yogyakarta secara langsung.

Kemudian bagi pelaku IKM di Kampung Batik ini strategi yang dapat mengoptimalkan potensi IKM batik itu sejalan dengan yang diinformasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Karena bagi mereka dengan adanya program sertifikasi pengrajin dapat membantu memotivasi pengrajin lain untuk terus berkembang dan menunjukkan bahwa pelaku IKM mumpuni di bidang kerajinan batik, hal ini disampaikan oleh Ibu Srinah, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam pengoptimalan terhadap IKM batik ini, bermula saya selaku pelaku IKM batik mendapatkan sosialisasi program dari DISNAKERIN mengenai sertifikasi pengrajin batik. Bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya mumpuni di

⁸⁹ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

bidang industri batik serta meningkatkan kepercayaan para konsumen mengenai kualitas produk yang saya buat.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan potensi IKM di Kampung Batik melalui program sertifikasi pengrajin membuat pengrajin menjadi lebih percaya diri dalam mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

b) *Empowering*

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat ditingkatkan melalui upaya “penguatan” yang juga dapat membantu masyarakat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap seluruh keterampilannya, yang mendukung kemandirian industri batik. Adapun yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melakukan penguatan IKM di Kampung Batik yaitu melalui pelatihan-pelatihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H beliau menjelaskan bahwa:

“Dinas telah menyelenggarakan program pelatihan-pelatihan yang meliputi pelatihan motif kepada pelaku IKM di Kampung Batik. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya untuk kalangan pemilik usaha batik akan tetapi juga diikuti oleh para pengrajin dibawah naungan pemilik IKM. Dengan adanya upaya pelatihan yang dilakukan dinas ini harapanya dapat membantu pemberdayaan untuk keseluruhan IKM batik yang ada di Kabupaten Tuban. Karena semakin paham minat konsumen akan motif yang cocok sesuai perkembangan zaman, maka akan semakin banyak konsumen yang akan tertarik.”⁹¹

⁹⁰ Srinah selaku owner Batik Surya/Kerompok wawancara pada 28 Desember 2022 Pukul 10.15 WIB.

⁹¹ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan dinas dalam mengimplementasikan strategi penguatan yakni berupa pelatihan motif, karena dengan adanya pelatihan motif akan semakin banyak produk yang ditawarkan. Yang mana tersedia berbagai motif sehingga dapat menarik konsumen.

Kemudian berdasarkan pelaksanaan strategi penguatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut yakni pelaku IKM. Dengan adanya pelatihan motif ini akan menginovasi pelaku IKM untuk terus membuat motif-motif yang baru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nanik Hariningsih, S.Pd bahwa:

“Pelatihan motif merupakan wujud dari upaya dinas untuk terus menggiatkan pelaku IKM agar terus termotivasi dan berinovasi untuk membuat motif lebih banyak. Dalam satu motif saya biasanya hanya menyediakan 3 sampai 5 lembar saja, karena dengan adanya banyak motif yang ditawarkan semakin berpotensi menarik konsumen juga.”⁹²

Artinya dapat dipahami bahwa pelatihan motif bagi pelaku IKM sangat disambut karena selain untuk memotivasi, maka akhirnya pelaku IKM akan mencetuskan inovasi motif baru dengan berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk kedalam strategi penguatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

⁹² Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner Melati Mekar Mandiri wawancara pada 19 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

Perindustrian terhadap pemberdayaan pelaku IKM di Kampung Batik.

c) Perlindungan (*Protection*)

Perlindungan dalam hal ini merupakan upaya untuk melindungi IKM batik terutama terhadap motif dan merek nya. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah membentuk program sertifikasi motif atau merek yang diharapkan mampu menjadi wadah salah yang salah satu fungsinya yakni fungsi perlindungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H yang menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dinas sebagai bentuk perlindungan terhadap industri batik yakni dengan melalui program sertifikasi motif atau merek. Perlindungan terhadap produk IKM diperlukan perlindungan HKI baik berupa merek, hak cipta. Upaya untuk pemenuhannya perlu dilakukan sinergi baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian maupun Dinas Koperasi, Usaha Menengah Dan Perdagangan untuk memberikan penyuluhan dan juga pendampingan sampai pada terdaftarnya perlindungan HKI atas produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM di Kampung Batik.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa strategi perlindungan dalam hal ini yaitu perlindungan HKI merek dan hak cipta. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi terkait hasil karya cipta utama pada karya cipta batik. Motif batik yang dapat didaftarkan adalah untuk

⁹³ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

desain motif batik yang baru dan bukan modifikasi motif lama. Perlindungan yang akan didapatkan atas karya motif batik tersebut, maka akan memunculkan hak eksklusif bagi pengrajin/pencipta untuk mempublikasikan/memperbanyak sendiri motif baru ciptaanya atau memberi izin kepada pihak lain.⁹⁴

Kemudian mengenai sertifikasi merek atau motif ini pelaku IKM sangat disarankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Hak Paten dan Hak Cipta motif batik dilakukan oleh pegawai BBKB. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nanik Hariningsih, S.Pd beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mengikuti program sertifikasi motif bertujuan untuk menciptakan inovasi motif baru, yang mendukung kami sebagai pelaku IKM memiliki produk yang berkualitas. Dengan terdaftarnya produk batik ke HKI membantu kami pelaku IKM, untuk mendapatkan validasi bahwa motif tersebut merupakan karya kami”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa strategi perlindungan yang dilakukan oleh dinas terhadap industri batik yakni melalui program sertifikasi motif atau merek. Dengan tersertifikasi HKI merek atau motif karya cipta batik dari pelaku IKM di Kampung Batik membantu pelaku IKM dalam memvalidasi karya ciptaannya, sehingga konsumen akan

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹⁵ Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner Melati Mekar Mandiri wawancara pada 19 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

mendapatkan berbagai motif yang berbeda pada setiap pelaku IKM yang ada di Kampung Batik.

Selain itu strategi perlindungan juga dilakukan oleh Bupati Tuban melalui Peraturan Kabupaten. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H yang menjelaskan bahwa:

“Pernah ditemukan pemesanan batik berskala besar industri Semen Indonesia mengingat karyawan di perusahaan tersebut sangat banyak sedangkan letak kawasan industri tersebut masih dalam lingkup satu kecamatan, akan tetapi bukan pemesanan dari Kampung Batik yang masih berada dikawasan satu kecamatan. Justru membeli batik Pekalongan, setelah ada laporan tersebut, Pemerintah Daerah mengintervensi bahwa untuk BUMD, ASN dan BUMN diwajibkan untuk menggunakan batik lokal untuk saat bekerja. Intervensi ini dimuat dalam intruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemakaian produk lokal yakni batik dan sepatu. Dalam pengadaan seragam batik tulis dan sepatu lokal untuk mengimplementasikan Instruksi Bupati tersebut, harus dipesan di UMKM Tuban secara merata. Ini penting, sebab nantinya akan menumbuhkan geliat ekonomi di sektor industri kreatif di Kabupaten Tuban. Pemesanan tidak boleh tersentral pada satu UMKM saja, harus merata se-Kabupaten Tuban.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa langkah Bupati Tuban dalam mendukung strategi penguatan IKM Kampung Batik yakni berupa instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 ini juga ditegaskan bahwa pemesanan batik tidak hanya dilakukan pada satu setral saja melainkan harus merata untuk menghindari asumsi-asumsi ketidakadilan.

⁹⁶ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

Adapun tanggapan pelaku IKM di Kampung mengenai instruksi Bupati mengenai wajib menggunakan produk batik untuk BUMD, ASN dan BUMN. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Srinah, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai wajib menggunakan produk batik dari intruksi Bupati itu bentuk support yang cukup membawa efek besar bagi pelaku IKM batik terutama di Kampung Batik. Ketika pelaksanaan pemesanan seragam batik para pelaku IKM Kampung Batik, akan tetapi program yang digagas Mas Bupati ini tidak bersifat jangka panjang. Hanya ketika dikeluarkannya instruksi tersebut banyak dari ASN melakukan pembelian yang dikoordinatori oleh pihak dari kecamatan, setelah memenuhi instruksi itu ya selesai.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dari perspektif pelaku IKM mengenai instruksi Bupati mengenai wajib menggunakan batik lokal, hanya memberikan efek jangka pendek. Karena pada kenyataannya program tersebut sudah tidak berjalan lagi sekarang.

d) Berkelanjutan (*sustainable*)

Dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban memberikan beberapa program pemberdayaan menjadi sebuah solusi inovatif dalam mengatasi masalah sosial dan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar terutama dari segi perekonomiannya.

⁹⁷ Srinah selaku owner Batik Surya/Kerompok wawancara pada 28 Desember 2022 Pukul 10.15 WIB.

Pemberian pelatihan baik itu untuk pengembangan kreativitas maupun untuk pemasaran, sertifikasi gratis, fasilitasi *event* dan fasilitasi penunjang untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung batik tentu saja membuat pelaku IKM di Kampung Batik memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Dari hasil program pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah tersebut, pelaku IKM di Kampung Batik yang pada awalnya harus berhenti memproduksi atau mengurangi karyawan kembali mendatangkan pekerja atau buruh pengrajin lagi menjadikan pelaku IKM maupun buruh yang dipekerja memiliki penghasilan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Adapun hasil pemberdayaan masyarakat IKM di Kampung Batik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Bagi pelaku IKM Kampung Batik
 - a) Meningkatkan kepercayaan diri pelaku IKM
 - b) Meningkatkan potensi Kampung Batik agar lebih dikenal luas
 - c) Membantu mengurangi kesulitan pemasaran

Berdasarkan hasil pernyataan diatas diketahui bahwa pemberdayaan IKM di Kampung Batik tidak hanya berhenti pada pengembangan kemampuan dan pekerjaan kepada pelaku IKM di Kampung Batik melalui program pelatihan baik itu untuk pengembangan kreativitas maupun untuk pemasaran, sertifikasi gratis, fasilitasi *event* dan fasilitasi penunjang untuk kebutuhan pelaku

IKM. Akan tetapi, pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah memiliki konsep pemberdayaan yang *sustainable* (berkelanjutan) dengan cara menciptakan wirausaha mandiri. Dengan mencetak banyak wirausaha mandiri membuat pemberdayaan di Kampung Batik tidak akan terhenti begitu saja karena akan terus berkembang dan berlanjut serta akan lebih memperbanyak pemberdayaan khususnya untuk pelaku IKM di Kampung Batik dan sekitarnya. Program pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan IKM. Artinya semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia maka keberlangsungan IKM semakin baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk mendorong pemberdayaan yang menumbuhkan pencapaian kinerja yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan keberlangsungan IKM.

Adapun keistimewaan prinsip keberlanjutan adalah dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. Sebab, akan tercipta masyarakat yang kuat, seimbang, dan harmonis. Kuat karena tidak tergantung pada pihak lain. Seimbang dan harmonis karena dilakukan secara proporsional dan bersama-sama. Bahkan, program yang berkelanjutan dan mengutamakan partisipasi masyarakat akan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perbaikan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat industri kecil menengah di Kampung Batik oleh Pemerintah Kabupaten menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Chambers.

Tabel 4. 2
Kesimpulan Teori

Teori Pemberdayaan (Robert Chambers)	Upaya Pemberdayaan
Berpusat pada manusia (<i>people centred</i>)	Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dengan pemberdayaan pada pelaku IKM di Kampung Batik, hampir setiap program yang digagas menunjukkan bahwa program tersebut orientasinya berpusat kepada manusia
Partisipatif (<i>participatory</i>)	Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengikuti pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga pemberdayaan IKM di Kampung Batik dapat berkembang seperti sekarang ini. Andilnya Ibu Srinah dan Ibu Nanik Hariningsih mengundang keinginan berkembang para pelaku IKM di Kampung Batik
<i>Empowering</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Enabling</i> dilakukan dengan sertifikasi pengrajin - <i>Empowering</i> dilakukan dengan pelatihan motif dan sertifikasi merek atau motif - <i>Protection</i> dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Instruksi Bupati Nomor 1

	Tahun 2021 tentang pemakaian produk lokal batik dan sepatu
Berkelanjutan (<i>suistenable</i>)	Pemberian pelatihan baik itu untuk pengembangan kreativitas maupun untuk pemasaran, sertifikasi gratis, fasilitasi <i>event</i> dan fasilitasi merupakan bentuk program yang berkelanjutan dan mengutamakan partisipasi masyarakat akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perbaikan masyarakat IKM di Kampung batik tentu saja membuat pelaku IKM di Kampung Batik.

2. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik

Pemberdayaan Industri kecil menengah (IKM) khusus pembuatan batik yang ada di Kampung Batik, Kabupaten Tuban yang ada di Kecamatan Kerek memang sering terjadi hambatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal, maka dari itu Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait yang berhubungan dengan Industri yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian perlu adanya meningkatkan perannya agar dalam pemberdayaan IKM dapat berkembang lebih baik dan saling menguntungkan antar pelaku IKM, dan menjaga sumber daya manusia. Maka perlu adanya strategi untuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban untuk mengatasi kendala khususnya di Kampung Batik. Pelaku IKM di Kampung Batik memiliki potensi yang mendukung implementasi pelaksanaan pemberdayaan IKM dikarenakan dari segi sumber daya manusia yang mumpuni, sebagian besar penduduk yang berada di Kampung Batik dari kaum muda sampai dengan lansia

memiliki keterampilan dalam membatik. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu

Srinah bahwa:

“Sebagian besar penduduk disini memiliki ketrampilan dalam membatik, baik itu kalangan muda sampai lansia. Jadi dengan ketrampilan yang dimiliki di Kampung Batik ini, kami pelaku IKM membantu para pengrajin yang memiliki bakat untuk terus dikembangkan dan diasah sehingga dapat menghasilkan produk yang unggul dan terus menghasilkan motif kebaruan”⁹⁸

Selain faktor pendukung berupa keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat di Kampung Batik. Adapun faktor yang mendukung implementasi pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kampung Batik yakni ketersediaan bahan yang dimiliki oleh pelaku IKM di Kampung Batik yang tidak ada surutnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nanik Hariningsih, S.Pd., sebagai berikut:

“Dukungan selain keterampilan itu yakni bahan baku dari pembuatan batik sendiri yang tidak terbatas serta bukan bahan yang sulit dicari. Banyak pengrajin di Kampung Batik ini yang kerap menjual bahan berupa kain tenun yang sudah jadi kepada pelaku IKM, untuk wilayah yang berdekatan dengan saya bahan baku kain tenun saya beli semua selagi tersedia. Karena bahan baku itu sangat membantu kami pelaku IKM menunjang keberlangsungan pembuatan batik tenun gedhog”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pemberdayaan ekonomi melalui IKM dari sisi pelaku IKM, sebagian besar masyarakat Kampung Batik memiliki keterampilan SDM dan bahan baku yang tersedia. Hal ini dapat membantu menunjang keberlangsungan pelaku IKM dalam memproduksi batik, sehingga antara

⁹⁸ Srinah selaku owner Batik Surya/Kerompok wawancara pada 28 Desember 2022 Pukul 10.15 WIB.

⁹⁹ Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner Melati Mekar Mandiri wawancara pada 9 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

pelaku IKM dengan pengrajin saling memberikan pengaruh dan keuntungan.

Kemudian untuk faktor pendukung implementasi pemberdayaan melalui IKM di Kampung Batik menurut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yakni dari sisi bahan dan SDM sudah mumpuni. Hal ini disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H menjelaskan bahwa:

“Yang mendukung pemberdayaan IKM di Kampung Batik itu karena dari sisi bahan dan SDM mereka mampu, akan tetapi yang menjadi permasalahan pada setiap IKM itu pemasaran. Maka dinas memberikan kesempatan pemasaran dengan melalui digital marketing itu seperti fasilitasi untu mengarahkan agar bisa dibelanja, di beri ruang oleh APBD masuk ke katalog lokal untuk pemasaran online lewat aplikasi “cari nih” yang kemarin datang ke Tuban memberikan sosialisasi ke teman-teman IKM.”¹⁰⁰

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa faktor pendukung implementasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM di kampung batik yakni ketersediaan bahan dan SDM yang sudah mumpuni, serta dukungan dari pemerintah dengan menyediakan katalog lokal melalui aplikasi online “cari nih”.

Kemudian untuk faktor penghambat implementasi pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kampung Batik yakni respon dari pelaku IKM yang kurang menerima program dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, tidak ada regenerasi dari pelaku IKM batik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H menjelaskan bahwa:

“Hambatan di kami sebenarnya tergantung temen-temen IKM sendiri, kadang kita sudah sudah memberikan fasilitasnya tetapi

¹⁰⁰ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

mereka kurang respon. Ada kurangnya pemahaman di teman-teman IKM itu ya, banyak teman-teman IKM yang mungkin miss komunikasi juga. Jadi pemahaman mereka dengan mengikuti program pemerintah termasuk legalitas dan perizinannya, ada kewajiban lain bagi mereka para IKM yang dirasa mereka akan menanggung beban baru yang akan malah merepotkan padahalkan enggak. Ya itu mungkin yang perlu diluruskan/dipahamkan ke teman-teman IKM misalnya gini Mbak, kalo dia diminta untuk memenuhi persyaratan legalitas usahanya beranggapan bahwa “Pak kalo saya sudah punya izinnnya ada kewajibab bayar pajak dan ada kewajiban lapor pajak”. Untuk ini mereka belum paham, akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang mana ada toleransi kalo usaha yang baru dimulainkan tidak mungkinmembayar pajak kan dari pemerintah sendiri itu fleksibel. Hambatan lain belum ada tidakan regenerasi pelaku IKM batik yang mungkin bagi kaum muda sekarang itu kurang menarik, selain itu dikeluhkan oleh teman-teman IKM itu salah satunya pemasaran.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dipahami bahwa faktor penghambat implemementasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM di kampung batik yakni pemahaman pelaku IKM dengan mengikuti program pemerintah termasuk legalitas dan perizinannya, ada kewajiban lain bagi mereka pelaku IKM dan merasa menanggung beban baru. Selain itu faktor lainnya yakni tidak ada regenerasi penerus pelaku IKM di Kampung Batik.

Selain itu terdapat faktor penghambat dari sisi pelaku IKM di Kampung Batik berupa pemasaran. Kesulitan dalam pemasaran turut dirasakan oleh pelaku IKM di Kampung Batik, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nanik Hariningsih, S.Pd, menjelaskan bahwa:

“Faktor yang menjadi permasalahan sampai saat ini itu masih mengenai pemasaran. Apalagi setelah kemarin sempat macet dan bahkan berhenti karena pandemi covid-19, sehingga kami pelaku IKM masih turut membangun kembali relasi yang sempat terputus

¹⁰¹ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

atau bahkan hilang. Dari DISNAKERIN menyediakan e-katalog yang mana produk kami ini terbantu sedikit”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui IKM di Kampung Batik yang dirasakan oleh pelaku IKM yakni dalam hal pemasaran.

Adapun solusi yang digagas dinas untuk menghadapi hambatan tersebut Dinas menawarkan beberapa program untuk tahun 2023 mengenai pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Handhi Ari Setyawan, S.H menjelaskan bahwa:

“Solusi yang dari saya sendiri mengenai kendala regenerasi itu saya punya pikiran gini, jadi kalo memang dari sisi pekerjaan, pengrajin batik itu menjanjikan banyak peluang untuk bisa menjadi mapan dan cukup untuk menghidupi. Itu mungkin bisa menggeser pemahaman image teman-teman kalangan muda, sementara saat ini kan mereka melihat kok gak menjanjikan pekerjaan ini. Padahal prospeknya untuk batik ini sebenarnya bagus cuman butuh ketekunan dan mungkin mereka bisa meneruskan tongkat estafet sebagai pewaris lanjutan yang melanjutkan usaha batik. Untuk regenerasi ini masuk ke dalam program dinas di tahun 2023 yaitu mengadakan event festival IKM dan lomba cipta karya. Adapun solusi yang berikan itu berupa Desa Devisa untuk wilayah Kecamatan Kerek sendiri kan di Kedungrejo dan Margorejo itupun termasuk sebagai ikhtiar dari pemerintah dari pemerintah untuk memberikan peluang pasar yang lebih luas ke produk batik. Karena harapan batik kan gak hanya dilokalan, regional tetapi bisa sampai internasional pasti akan semakin banyak produksi juga yang dituntut maka semakin banyak pemasaran. Jadi kalo minatnya banyak harganya kan bisa naik, otomatis nanti pelakunya, pengrajinnya Insya Allah taraf hidupnya juga semakin baik. Karena bahannya banyak, skillnya mereka punya jadi tinggal menggenjot pemasaran. Selain itu dinas juga akan melakukan pendataan ulang data IKM agar lebih terupdate, dengan itu harapannya bisa mengklasifikasi ada yang masih pemula. Ada yang sudah berkembang, ada yang sudah maju berdasarkan

¹⁰² Nanik Hariningsih, S.Pd selaku owner Melati Mekar Mandiri wawancara pada 9 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

klasifikasi itu bisa tau bahwa yang membutuhkan sentuhan management itu yang kelas ini lo, dengan mengklasifikasikan dinas bisa memberikan treatment yang secara benar.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dipahami bahwa dari terdapat solusi untuk mengatasi faktor hambatan yakni melalui program Desa Devisa dan di program tahun 2023 Dinas menambahkan program update data IKM, event festival IKM dan lomba cipta batik untuk mengatasi kendala regenerasi IKM terutama industri batik.

Adapun faktor pendukung dan penghambat serta solusi dalam pemberdayaan Industri kecil menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban, diantaranya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Kesimpulan Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
- Ketersediaan bahan dan SDM sudah mumpuni.	- Respon dari pelaku IKM yang kurang menerima program dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Kesulitan dalam pemasaran - Kurangnya pemahaman pelaku IKM Kampung Batik mengenai program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Tidak ada regenerasi penerus usaha batik yang tersedia	- Update data IKM batik - Event festival IKM batik - Lomba cipta batik

¹⁰³ Handhi Ari Setyawan, S.H., (Kabid Perindustrian) wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

Berdasarkan analisis data dua rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa politik pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik terdapat beberapa aktor luar yang berpartisipasi dalam pemberdayaan selain yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki beberapa program terkait pelaksanaan pemberdayaan dalam mewujudkan program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat dilakukan melalui masyarakat dimana masyarakat yang memiliki modal serta masuk dalam kriteria pelaku IKM. Kemudian di satu sisi cara menjalankan program dapat dilakukan melalui pendamping yang langsung diimplementasikan kepada pelaku IKM.

Adapun temuan yang berkenaan dengan politik pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik dalam berdasarkan analisis data yaitu mengenai instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pemakaian produk lokal berupa batik dan sepatu. Dalam pelaksanaan program ini menurut pelaku IKM bukan program yang bisa berlaku untuk jangka panjang karena realita di lapangan, bahwa pemesanan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban bukan untuk melestarikan warisan budaya yang dimiliki. Sebenarnya program yang dilakukan oleh Bupati ini bagus akan tetapi akan lebih bagus jika dilakukan fasilitasi lain untuk mengenalkan Kampung Batik dengan membangun kembali wisata edukasi kampung batik dengan melalui promosi yang dilakukan oleh Pemerintah.¹⁰⁴

Kemudian dalam pelaksanaan program melalui tim pendamping dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu hanya terdapat 5 orang saja yang mana tentunya kecepatan dan ketepatan target tentunya akan terhambat, akan lebih baik jika dilakukan penambahan sesuai dengan kluster wilayah yang lebih disempit lagi serta melakukan kerjasama dengan membentuk ketua paguyuban agar bisa memonitoring langsung pelaksanaan program ditingkat dusun.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Srinah selaku owner Batik Surya/Kerompok wawancara pada 28 Desember 2022 Pukul 10.15 WIB

¹⁰⁵ Sonif Efendi (Tim Pendamping IKM) wawancara pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 09.10 WIB.

Selain itu temuan lainnya yakni dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui IKM di Kampung Batik yakni banyaknya Pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tuban yang belum terdata dikarenakan terfokusnya pembinaan terhadap pelaku IKM yang sudah berkembang, sehingga pendataan pelaku keseluruhan pelaku IKM termasuk di Kampung Batik. Selain itu terbatasnya anggaran yang mendukung program pelaksanaan sertifikasi motif dan pengrajin dikarenakan banyak pengrajin yang merasa terbebani oleh pembayaran pajaknya, akan lebih baik jika dilakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya kedua sertifikasi tersebut dengan ditunjang melalui pelatihan pemasaran yang dilakukan mulai dari tahap pendaftaran di *platform* digital sampai memenuhi target penjualan yang ditentukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian mengenai “Politik Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Menengah di Kampung Batik, Kabupaten Tuban: Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Robert Chambers” sebagai berikut:

1. Staregi pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik oleh Pemerintah Daerah menggunakan teori pemberdayaan oleh Robert Chambers. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat melalui IKM di Kampung Batik yaitu *berpusat pada manusia (people centred)* upaya pemberdayaan dengan konsep yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dengan pemberdayaan pada pelaku IKM di Kampung Batik, hampir setiap program yang digagas menunjukkan bahwa program tersebut orientasinya berpusat kepada manusia, *partisipatif (participatory)* upaya pemberdayaan dengan diikuti partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengikuti pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga pemberdayaan IKM di Kampung Batik dapat berkembang seperti sekarang ini. Andilnya Ibu Srinah dan Ibu Nanik Hariningsih mengundang keinginan berkembang para pelaku IKM di Kampung Batik, *empowering* melalui tiga aspek yaitu *enabling* dilakukan dengan sertifikasi pengrajin, *empowering* dilakukan dengan pelatihan motif dan sertifikasi merek atau motif, *protection* dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemakaian produk lokal batik dan sepatu, *berkelanjutan (sustainable)* Pemberian pelatihan baik itu untuk pengembangan kreativitas maupun untuk pemasaran, sertifikasi gratis, fasilitasi *event* dan fasilitasi merupakan bentuk program yang berkelanjutan dan mengutamakan partisipasi masyarakat akan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perbaikan masyarakat IKM di Kampung batik tentu saja membuat pelaku IKM di Kampung Batik.

2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pemberdayaan IKM Kampung Batik. Adapun faktor pendukung yakni ketersediaan bahan dan SDM yang mumpuni, untuk faktor penghambat yakni respon dari pelaku yang kurang menerima program, kurangnya pemahaman terhadap program dan tidak ada regenerasi. Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut dengan melakukan program untuk festival IKM Batik dan lomba cipta batik

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

Penulis merekomendasikan pemerintah Kabupaten, perlu untuk membuat peraturan khususnya mengenai menjaga, melestarikan dan memelihara batik gedhog Tuban. Pembuatan peraturan daerah akan sangat membantu bagi para pengusaha, pengrajin dan pemangku kekuasaan atau stakeholder untuk dijadikan acuan, pedoman, perencanaan dan juga aturan untuk melindungi warisan budaya salah satunya batik gedhog. Selain itu pemerintah Kabupaten seharusnya juga fokus terhadap peningkatan kualitas SDM pengrajin serta memfasilitasi pendekatan nilai produknya.

2. Bagi pengusaha Penulis merekomendasikan pengusaha, pengrajin dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam hal menjaga, melestarikan dan memelihara batik gedhog baik itu batik klasik ataupun kreasi baru. Seharusnya pemerintah Kabupaten berperan aktif dan lebih memperhatikan pengrajin batik gedhog di Kampung Batik untuk mengembangkan dan mengkreasikan batik gedhog itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjadi, Judi Knight, and E.A Natanegara. *TENUN GEDHOG The Hand-Loomed Fabrics of Tuban, East Java*. Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2010.
- Afifuddin, H, and Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Agustina, Rischi. “Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Indsutri Kecil Dan Menengah (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Kediri).” Universitas Brawijaya, 2019.
- Alamsyah, Bachtiar Ginegar. “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Aswadi, Hazarul. “Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pelatihan IKM Berbasis Kerajinan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Chambers. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang/Robert Chambers*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1997.
- Fada, Hawa La’ala Nabilla. “Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Girilayu.” *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 7, no. 1 (2022): 1–19.
- Fadhillah, Anisa Nuur, Tri Yulianti, and Adi Soesiantoro. “Tranformasi Digital

Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi.” *Seminar Nasional 2022* 1, no. 01 (2022).

Fadrianto, Adhe Filima. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah.” Universitas Brawijaya, 2019.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, and Fahima Diah Anisa. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Hariyoko, Yusuf, Adi Soesiantoro, and Mohammad Agus Junaidi. “Pemberdayaan UMKM Batik Tulis Di Kampong Batik Jetis Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.” *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2021): 1–10.

Hasan, Kamaruddin. “Komunikasi Sosial Dan Pembangunan (KSP) People Centred Development (Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat).” In *Teaching Resource*, 1–9. Repository Universitas Malikussaleh, 2019.

Hikmah Andini, Uly, Mochamad Saleh Soeaidy, and Ainul Hayat. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 12 (2015): 7–11.

Ir. Hendra Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca*. Vol. 1, 2018.

- Kasnelly, Sri, and H Ahmad Luthfi. "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional." *Sembadha* 02 (2021): 351–355.
- Kurniawati, Amelia. "Knowledge Management in Small and Medium Industry: A Cluster Analysis in Kampoeng Batik Laweyan." *International Journal of Knowledge Engineering* 5, no. 1 (2019): 35–39.
- Masrohatin, Siti. "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tulis Di Desa Tampo Kecamatan Cluring." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Muslim, Aziz. "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 7, no. 2 (2020): 89–103.
- Mutiani, Mutiani, Ersis Warmansyah Abbas, Syaharuddin Syaharuddin, and Heri Susanto. "Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Model Transcript Based Learning Analysis (TBLA) Dalam Pembelajaran Sejarah." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3, no. 2 (2020): 113–122.
- Nawangsari, Ertien Rining, Eva Yulia Fridayanti, Aktivani Inas Almira, and Riyaya Hajja Nugrohowati. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tuban." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 5, no. 2 (2021): 345.
- Nurdiantika, Ema, and Bambang Sigit Widodo. "Karakteristik Kehidupan Pengrajin Batik (Studi Kasus Di Wilayah Kerajinan Batik Gedog Di Desa

Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban).” *Swara Bhumi* 2, no. 2 (2015): 302–309.

Nurhayati, Siti. “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta.” Universitas Sebelas Maret, 2019.

Parapat, Eka Pratiwi Septania, and Ricat Berlien. “Analisis Peningkatan Potensi Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis Teknologi Pada Masyarakat Nelayan Desa Sirukkungon Kabupaten Toba Sumatera Utara.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 3389–3397.

Pathony, Tony. “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang.” *Ijd-Demos* 1, no. 2 (2020): 262–289.

Pradita, Agus Hari, and Wahyu Hidayat Riyanto. “Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban.” *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 5, no. 1 (2021): 42–50.

Puspaningtyas, Anggraeny, and Ahmad Adhi Suprayitno. “Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban.” *Reformasi* 11, no. 2 (2021): 217–225.

Putra, Rendi Anggara. “Analisi Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Pengusaha Batik Tulis Klasik Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.” *Repository Untag SBY* (2022): 1–10.

Rahmawati, Evi, and Bagus Kisworo. "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (2017): 161–169.

Robi, Firdaus. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Partai Politik: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Sholikhah, Imroatus, Rochmat Purnomo, Sayid Abas, Asis Riat Winanto, and Choirul Hamidah. "Industri Kreatif Pada Batik Tulis Tenun Gedog : Kondisi." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2020): 198–211.

Silviana, Ika. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Produksi Batik Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan." Universitas Negeri Semarang, 2019.

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing*, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit ALFABETA, 2013.

Suhermanto. "Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros." Universitas

Muhammadiyah Makassar, 2020.

Susilo, David Adi, Retno Sunu Astuti, and Budi Puspo Priyadi. "Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Natapraja* 7, no. 2 (2019): 245–258.

Syafingi, Habib Muhsin, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Alan Bayu Aji. "Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 2 (2019): 139–149.

Tanjung, Agustini, Nur' Aeni, and Shinta S. Heriyanti. "Peningkatan Tata Kelola Desa Dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur." *Jurnal Abdimas Pelita ...* 2, no. 01 (2021): 7–13.

Tuban, BPS Kabupaten. *Kabupaten Tuban Dalam Angka (Tuban Regency in Figures) 2022*. BPS Kabupaten Tuban, 2021.

Wardani, Laksmi Kusuma, Ronald Hasudungan, and Irianto Sitindjak. "Batik Gedhog Tuban, East Java," 2013.

Wicaksono, Gogot Haryo. "Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedhog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)." Universitas Brawijaya, 2016.

Widhagdha, Miftah Faridl, and Suryo Ediyono. "Case Study Approach in

Community Empowerment Research in Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)* 1, no. 1 (2022): 71–76.

Widiyawati, Anita Tri. “Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi Pada Perpustakaan Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember).” *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 77.

Peraturan Menteri Perindustrian, No.6/M-IND/PER/7/2016 Pasal 3 Ayat 1

Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batik Mark Indonesia

Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A